

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA *VALUE FOR MONEY* DALAM
MENGELOLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR PEMERINTAHAN DESA GUNUNG
MEGANG LUAR KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis**



Nama : Diana sari
NIM : 22.2012.300

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Diana Sari
Nim : 22.2012.300
Progam Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, April 2017

Penulis



Diana Sari

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : Analisis Pengukuran Kinerja *Value for Money*
Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Belanja
Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Pada
Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang**

Nama : Diana Sari

Nim : 22.2012.300

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Progam Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 29 Maret 2017
Pembimbing**



(Nina Sabrina,SE.,M.Si.)

NIDN/NBM :0216056801/851119

**Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Progam Studi Akuntansi**



(Betri Sirajuddin,SE.,M.SI.,AK.,CA)

NIDN/NBM :0269101502/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAAN

MOTTO

- ❖ *Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri*

(QS Ar-Ra'd: 11)

- ❖ *Jika anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali karena anda tidak tahu seberapa dekat anda dengan kesuksesan.*

(Diana Sari)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ *Allah SWT Beserta Rasulullah SAW*
- ❖ *Kepada Papaku tercinta Dadang Suardi dan mamaku tersayang Yuliana*
- ❖ *Adik kandungku Cindy Antika*
- ❖ *Keluarga besarku yang berada di Tanjung Enim dan Palembang*
- ❖ *Dosen – dosenku*
- ❖ *Seseorang yang akan mendampingiku kelak*
- ❖ *Teman – Teman Seperjuangan*
- ❖ *Almamaterku*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah – Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja *Value For Money* Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang Kabupaten Muara Enim”. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua orang tua yang do'a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nina Sabrina, SE, M.Si. selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Kepada keluarga besar, Papa Dadang Suardi dan Mama Saya Yuliana yang tercinta, terima kasih atas doa yang telah diberikan serta bantuan baik itu secara materi dan non materi serta kesabarannya selama ini serta Adik kandung ku tersayang Cindy Antika yang selalu memberikan semangat serta doanya.
2. Bapak Abid Djazuli, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf karyawan / karyawan.
3. Bapak Drs.Fauzi Ridwan,M.M., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Betri Sirajuddin,SE,M,SI,AK,CA dan Bapak Mizan,SE,M.SI, AK,CA Selaku ketua Progam Studi Akuntansi dan Wakil Progam Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Keluarga besar yang berada di tanjung enim serta mamang ku tersayang Suhadi yang secara tidak langsung telah memberikan semangat dan doanya
7. Bapak Rahman selaku sekretaris desa gunung megang terima kasih atas izin penelitian yang telah diberikan
8. Ahmad Firlana dan Esah yang selalu memberikan dukungan dan semangat
9. Mbak Titin, Lia, Tuti, Ani dan anak kosan lainnya terima kasih telah mmberikan doa semangatnya serta bantuannya selama ini.

10. Teman – teman seperjuangan akuntansi angkatan 2012 fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

11. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu terima kasih
atas kebaikan yang telah dibeikan

Semoga Allah SWT memberikan balasan budi baik semuanya, Penulis
juga menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan seperti yang
diinginkan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk
kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi,
pengetahuan serta manfaat bagi pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, April 2017

Penulis



Diana

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
HALAMAN ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya	10
B. Landasan Teori	13
1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	
a. Pengertian Anggaran dan APBDes.....	13
b. Fungsi Anggaran Desa.....	15
c. Manfaat Anggaran Desa.....	17
d. Prinsip – Prinsip Anggaran Desa.....	18
e. Komponen Dalam Anggaran.....	19
2. Pengukuran Kinerja	
a. Pengertian Pengukuran Kinerja.....	23
b. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	24
c. Manfaat Pengukuran Kinerja.....	26
3. Pengukuran <i>Value For Money</i>	
a. Pengertian <i>Value For Money</i>	27
b. Pengukuran <i>Value For Money</i>	27
4. Pelayanan Publik	
a. Pengertian Pelayanan Publik	31
b. Standar Pelayanan Publik	31
c. Ruang Lingkup / Jenis Pelayanan Publik	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
---------------------------	----

B. Lokasi Penelitian	37
C. Operasionalisasi Variabel	37
D. Data yang diperlukan	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	42
1. Sejarah Pemerintahan Desa Gunung Megang Luar Kabupaten Muara Enim.....	42
2. Tugas dan Fungsi	
a. Tugas Kantor Pemerintahan Desa Gunung	43
b. Fungsi Kantor Pemerintahan Desa Gunung.....	43
3. Visi dan Misi	
a. Visi Kantor Pemerintahan Desa Gunung	44
b. Misi Kantor Pemerintahan Desa Gunung	44
4. Struktur Organisasi.....	45
5. Kepegawaian Pemerintahan desa gunung megang...	49
6. Pejabat terkait Pengelolaan APBDes	51
7. Laporan Realisasi anggaran pendapatan belanja desa	56
8. Rincian Laporan Realisasi anggaran pendapatan Belanja desa.....	68
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	69
1. Pengukuran Kinerja <i>Value For Money</i>	69

a. Rasio Ekonomis	
1) Perhitungan.....	69
2) Analisis	75
b. Rasio Efisiensi	
1) Perhitungan	77
2) Analisis	82
c. Rasio Efektifitas	
1) Perhitungan	83
2) Analisis	88
d Outcome	93
2. Pelayanan Publik.....	93
a. Pelayanan Barang Publik	995
b. Pelayanan Jasa Publik	98
c. Pelayanan Administrasi.....	98

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Progam – Progam Terlaksana dan Tidak Terlaksana	5
Tabel 1.2	Anggaran Dan Realisasi Dana Desa	6
Tabel 2.1	Perbedaan penelitian Sebelumnya dan Penelitian Sekarang.....	12
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel	36
Tabel 4.2	Pegawai Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang Berdasarkan Bidang Kerja	49
Tabel 4.3	Pegawai Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang Berdasarkan jenjang pendidikan	49
Tabel 4.4	Pegawai Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang	50
Tabel 4.5	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2011	55
Tabel 4.6	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2012	57
Tabel 4.7	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2013	59
Tabel 4.8	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2014	61
Tabel 4.9	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2015	64
Tabel 4.10	Rincian Anggaran Realisasi Pendapatan Desa Gunung Megang	67
Tabel 4.11	Rincian Anggaran Realisasi belanja Desa Gunung Megang	67

Tabel 4.12	Hasil Rasio Ekonomis Desa Gunung Megang.....	74
Tabel 4.13	Hasil Rasio Efesien Desa Gunung Megang	82
Tabel 4.14	Hasil Rasio Efektifitas Desa Gunung Megang	88
Tabel 4.15	Rincian Progam dan Kegiatan yang dijalankan Desa Gunung Megang dari tahun 2011 sampai dengan 2015	90
Tabel 4.16	Rincian Progam yang Belum Dilaksanakan Desa Gunung Megang.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.I	Struktur Organisasi Pemerintahan desa Gunung Megang.....	44
------------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 2 : Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Fotocopy Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 4 : Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Quran
- Lampiran 5 : Fotocopy Sertifikat Toefl
- Lampiran 6 : Fotocopy Piagam KKN
- Lampiran 7 : Fotocopy Sertifikat Lab. Komputer
- Lampiran 8 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Diana Sari / 22 2012 300 / Analisis Pengukuran Kinerja *Value For Money* dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Desa Gunung Megang Kabupaten Muara Enim / Akuntansi Sektor Publik

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah konsep *value for money* dalam mengukur kinerja anggaran pendapatan belanja desa guna meningkatkan pelayanan publik pada pemerintah desa gunung megang ? Dengan tujuan Untuk mendiskripsikan konsep *Value For money* dalam menilai kinerja anggaran pendapatan belanja desa guna meningkatkan pelayanan publik pada pemerintahan desa gunung megang. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian pengukuran *value for money* dalam aspek keuangan menunjukkan, rasio ekonomi telah memenuhi standar rasio karena biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional selisihnya tidak jauh berbeda dengan biaya yang ditetapkan, rasio efisiensi belum efisien karena adanya pemborosan anggaran belanja, rasio efektifitas sudah terbilang efektif karena telah memenuhi standar rasio *value for money* sedangkan pelayanan publik desa gunung megang masih belum berjalan secara optimal karena masih terdapat masalah dalam kebutuhan warga desa.

Kata Kunci : Pengukuran *Value For Money*, APBDes, Pelayanan publik.

Diana Sari / 22 2012 300 / *Analysis of Performance Measurement Value For Money in Managing Rural Budget to Improve Public Services On Mountain Village Government Megang Muara Enim regency / Public Sector Accounting*

The formulation of the problem in this research is How the concept of value for money in measuring the performance of village government budget in order to improve public services in the government holding a mountain village? With the aim to describe the concept of Value For money in assessing the performance of village government budget in order to improve public services in the government holding a mountain village. By using primary data and secondary data. Data pengmpulan techniques are interviews, observation and documentation. And data analysis used is qualitative and quantitative. Results of research measurement value for money in the financial aspects of the show, the ratio of the economy has met the standard ratio for the costs incurred in the operations of the difference is not much different for a set fee, efficiency ratio is not efficient for their wasteful spending, effectiveness ratio is fairly effective because it has been meet the standard of value for money ratio while holding the mountain village public service is still not running optimally because there is still a problem in the needs of the villagers.

Keywords: Measurement Value For Money, APBDes, public services.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia. Pemerintahan desa berperan untuk mengatur masyarakat dipedesaan demi mewujudkan kemajuan desa. Berdasarkan perannya tersebut maka diterbitkanlah peraturan – peraturan yang berkaitan dengan pemerintah desa yang dapat dilihat melalui undang – undang menurut permendagri No.113 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi desa dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik desa maka lembaga pemerintah desa dituntut mampu untuk memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat dan murah dari pemerintah yang masih sulit oleh karena itu pelayanan publik harus ditingkatkan baik melalui gerakan kultural, struktural maupun kampanye pembangunan. Menurut Undang - Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik , pelayanan

Publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Agar pemerintah desa memiliki kerangka berpikir secara sistematis, terarah dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi desa Maka setiap Desa diharuskan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang disingkat dengan RPJM Desa. RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun selain itu harus memiliki rencana kerja pembangunan desa RKP desa yang artinya adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sedangkan pengaturan tentang anggaran desa dituangkan kedalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana –

rencana program yang dibiayai dengan uang desa, dimana dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

APBDes disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan APBDes maka diperlukan suatu alat untuk menilai kinerja keuangannya melalui perhitungan dan analisis pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas APBDes baik dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mengelola keuangan, hasil kegiatan dan efektivitas tindakan dapat terwujud sesuai yang direncanakan dan bisa memastikan apakah pengambilan keputusan sudah dilakukan secara tepat dan obyektif. Selain itu ukuran kinerja juga digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Masyarakat tentu tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu,

pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dimana Masyarakat menghendaki pemerintah dapat memberikan banyak pelayanan dengan biaya yang murah.

Untuk mengetahui apakah suatu aktifitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif maka diperlukan pengukuran kinerja *value for money*, yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang digunakan untuk mengukur hasil kerja yang didasari pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas secara sistematis. Manfaat *Value for money* didalam kinerja adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik sehingga kinerja yang dilakukan tepat sasaran, menurunkan biaya secara hemat dan memanfaatkan sumber daya yang ada agar hasil kerja yang didapat lebih optimal dan untuk memperbaiki atau mengevaluasi hasil kerja yang dipandang sebagai tujuan dan sekaligus sebagai cara untuk mencapai sasaran pembangunan secara menyeluruh dengan berfokus pada penghematan, efisiensi dan ekonomi.

Permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) organisasi adalah bagaimana membandingkan *input* dengan *output* untuk menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan jika *output* yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Solusi praktis atas masalah tersebut adalah dengan cara membandingkan *input financial* (biaya) dengan *output nonfinancial*,

misalnya biaya unit (*unit cost statistics*). *Unit cost statistics* tersebut dapat digunakan sebagai benang merah untuk mengukur kinerja.

Pemerintah desa gunung megang memiliki susunan organisasi yang meliputi pemerintahan desa, sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan, bidang pemberdayaan sosial, bidang bantuan serta pembinaan kelembagaan sosial. Dalam rangka merealisasikan seluruh tugas tersebut masing – masing bidang menjalankan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak program – program yang terlaksana dan program yang tidak terlaksana hal ini berarti bahwa pelayanan publik oleh pemerintah semakin hari semakin bertambah dan harus lebih ditngkatkan kualitasnya. Untuk melihat secara jelas program yang terlaksana dan tidak terlaksan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Program – Program terlaksana dan tidak terlaksana

Program / Kegiatan	Terlaksana	Belum Terlaksana
Pembangunan Jalan Besi Rabat Beton	✓	-
Dusun 1 – Dusun 4 Pembangunan MCK umum	-	✓
Pembangunan Siring induk	✓	-
Perbaikan Jembatan Gantung Rusak	-	✓
Pembangunan Pos Kamling Permanen	✓	-
Musim Hujan air tergenang terjadi banjir	-	✓
Pembuatan Jalan antar Desa ke Desa Sidomulyo	-	✓

Sumber kantor pemerintahan desa gunung megang luar 2017

Berdasarkan kondisi kegiatan dan program yang terjadi, maka menyebabkan anggaran pendapatan belanja desa gunung megang menjadi surplus atau kelebihan anggaran. Dimana dapat dilihat dari kondisi ekonomi desa gunung megang belum memperhatikan kinerja dan tergolong belum ekonomis dimana biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasionalnya lebih besar dari biaya yang dianggarkan, kondisi efisiensi pendapatan belanja desa gunung megang dinilai efisien karena instansi dapat berhemat dalam menggunakan anggaran yang telah ditetapkan dimana belanja daerah yang seharusnya tidak melampaui pendapatan daerah agar nantinya penggunaan keuangan daerah dapat dipergunakan lebih efisien sedangkan kondisi efektifitas realisasi penerimaan desa gunung megang melampaui target yang telah ditetapkan dimana jumlah anggaran lebih besar dari realisasi.

Untuk melihat secara jelas anggaran dan realisasi penerimaan alokasi dana APBDes pemerintah desa gunung megang tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Dana Desa Gunung Megang

Tahun	Keterangan	Anggaran	Realisasi	Selisih
2011	Belanja Pegawai	Rp. 59,519,000	Rp. 34,744,000	Rp. 24,775,000
	Belanja barang dan jasa	Rp. 71,055,000	Rp. 70,086,000	Rp. 969,000
	Belanja modal	Rp. 58,700,000	Rp. 54,000,000	Rp. 4,700,000

	Jumlah	Rp.189,274,000	Rp.158,830,000	Rp. 30,444,000
2012	Belanja Pegawai	Rp. 66,520,000	Rp. 58,230,000	Rp. 8,290,000
	Belanja barang dan jasa	Rp. 79,500,000	Rp. 45,450,000	Rp. 34,050,000
	Belanja modal	Rp. 94,700,000	Rp. 74,450,000	Rp. 20,250,000
	Jumlah	Rp.240,720,000	Rp.178,130,000	Rp. 62,590,000
2013	Belanja Pegawai	Rp.136,150,000	Rp.130,385,000	Rp. 5,765,000
	Belanja barang dan jasa	Rp.182,415,000	Rp.170,555,000	Rp. 11,860,000
	Belanja modal	Rp.106,550,000	Rp.103,400,000	Rp. 3,150,000
	Jumlah	Rp.425,115,000	Rp.404,340,000	Rp. 20,775,000
2014	Belanja Pegawai	Rp.345,040,000	Rp.318,040,000	Rp. 27,000,000
	Belanja barang dan jasa	Rp.358,709,000	Rp.433,810,000	Rp.(75,101,000)
	Belanja modal	Rp.196,365,000	Rp.138,461,000	Rp. 57,904,000
	Jumlah	Rp.900,114,000	Rp.890,311,000	Rp. 9,803,000
2015	Belanja Pegawai	Rp.548,169,000	Rp.501,040,000	Rp. 47,129,000
	Belanja barang dan jasa	Rp.492,450,000	Rp.492,450,000	-
	Belanja modal	Rp.185,000,000	Rp. 86,000,000	Rp .99,000,000
	Jumlah	Rp.1,225,619,000	Rp.1,079,490,000	Rp.146,129,000

Sumber kantor pemerintahan desa gunung megang luar 2017

Dari tabel maka dapat dilihat bahwa jumlah anggaran lebih besar dibanding realisasi sehingga menyebabkan selisih setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengukuran Kinerja *Value For Money* dalam Mengelola anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDes) guna meningkatkan pelayanan publik pada Pemerintahan Desa Gunung Megang kabupaten muara enim.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah konsep *value for money* dalam menilai kinerja anggaran pendapatan belanja desa guna meningkatkan pelayanan pulik pada pemerintah desa gunung megang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang terjadi, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mendiskripsikan konsep *Value For money* dalam menilai kinerja anggaran pendapatan belanja guna meningkatkan pelayanan publik pada pemerintahan desa gunung megang.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan manfaat bagi penulis, pemerintahan tempat penulis mengadakan penelitian dan bagi peneliti selanjutnya.

1. Manfaat bagi penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan mempelajari lebih dalam mengenai konsep *value for money* dalam menilai anggaran pendapatan belanja guna meningkatkan pelayanan publik

2. Manfaat bagi pemerintahan desa gunung megang

Pemerintahan gunung megang dapat memperoleh bahan masukan dan mengetahui masalah – masalah yang terjadi dalam pemerintahan tentang laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Isna Ardila (2015) yang berjudul Analisis kinerja keuangan dengan pendekatan *Value for money* pada pengadilan negeri tebing tinggi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengadilan negeri tebing tinggi telah melaksanakan progam kerjanya dengan baik ? Bagaimana konsep *Value for oney* didalam pegadilan negeri tebing tinggi? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengadilan negeri tebing tinggi telah melaksanakan progam kerjanya dengan baik dan untuk mengetahui konsep *Value for oney* didalam pengadilan negeri tebing tinggi.

Data yang digunakan data primer. Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran belanja negara tidak ekonomis karena belum memenuhi standar ekonomis *value for money* sedangkan efesiensi dan efektifitas mengalami peningkatan dimana dapat dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa yang diberikan pengadilan negeri tebing tinggi sudah terpenuhi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Umi Yunianti (2015) Analisis efesiensi dan efektifitas anggaran pendapatan belanja desa (APBDES) pada desa agrodadi yogyakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah Apakah perkembangan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES) sudah efisien dan efektif dalam mengelola anggaran di desa agrodadi yogyakarta ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan efisiensi dan efektifitas APBDes di desa agrodadi.

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan naik turunnya perkembangan kinerja keuangan APBDES agrodadi menunjukkan bahwa kinerja pendapatan berfluktuatif selama 4 tahun apabila dilihat dari rasio efisiensi perkembangan kinerja keuangan pemerintah desa sangat baik karena pada tahun 2011 dan 2013 mengalami peningkatan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Siti Khairani (2013) yang berjudul Analisis *value for money* dan akuntabilitas dalam meningkatkan pelayanan publik pada PDAM Tirta Musi Palembang . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaksanaan *Value for money* pada PDAM Tirta Musi Palembang ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban PDAM Tirta Musi Palembang dengan bentuk *value for money*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuisisioner dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan

akuntabilitas PDAM Tirta Musi Palembang sudah cukup baik karena keluhan – keluhan pelanggan selama tiga tahun masih bisa diatasi dengan baik walaupun masih ada keluhan yang mengalami kenaikan penyebabnya yaitu karena adanya penyambungan air secara ilegal lalu perusahaan ini juga kurang memberikan informasi tentang PDAM Tirta Musi untuk pelanggan apalagi ketika air akan mati esok harinya, banyak pelanggan yang tidak mengetahuinya sehingga pelayanan publik belum bisa dikatakan baik.

Tabel II.I

Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian Sekarang

Nama Peneliti dan Judul Penelitian Sebelumnya	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
Isna Ardila (2015) Analisis kinerja keuangan dengan pendekatan <i>Value for money</i> pada pengadilan negeri tebing tinggi.	menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran belanja negara tidak ekonomis karena belum memenuhi standar ekonomis <i>value for money</i> sedangkan efisiensi dan efektifitas mengalami peningkatan dimana dapat dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa yang diberikan pengadilan negeri tebing tinggi sudah terpenuhi	Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama – sama meneliti <i>Value for money</i> sedangkan Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti mengenai keuangan dipengadilan sedangkan dalam penelitian ini meneliti anggaran pendapatan belanja desa
Umi Yuniarti (2015) Analisis efisiensi dan efektifitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES)	Berdasarkan naik turunnya perkembangan kinerja keuangan APBDES argodadi menunjukkan bahwa kinerja pendapatan berfluktuatif selama 4 tahun apabila dilihat dari rasio efisiensi perkembangan kinerja keuangan pemerintah	Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama – sama meneliti rasio efisiensi dan efektifitas anggaran pendapatan dan belanja Perbedaannya penelitian sebelumnya hanya

	desa sangat baik karena pada tahun 2011 dan 2013 mengalami peningkatan	membahas sebagian dari pengukuran kinerja sedangkan dalam penelitian ini meneliti keseluruhan pengukuran kinerja <i>value for money</i>
Siti Khairani (2013) Analisis <i>value for money</i> dan akuntabilitas dalam meningkatkan pelayanan publik pada PDAM Tirta Musi Palembang	Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas PDAM Tirta Musi Palembang sudah cukup baik karena keluhan – keluhan pelanggan selama tiga tahun masih bisa diatasi dengan baik walaupun masih ada keluhan yang mengalami kenaikan penyebabnya yaitu karena adanya penyambungan air secara ilegal lalu perusahaan ini juga kurang memberikan informasi tentang PDAM Tirta Musi untuk pelanggan apalagi ketika air akan mati esok harinya, banyak pelanggan yang tidak mengetahuinya sehingga pelayanan publik belum bisa dikatakan baik.	Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama – sama meneliti <i>Value for money</i> sedangkan Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti mengenai akuntabilitas dari <i>value for money</i> PDAM Tirta Musi sedangkan penelitian ini hanya meneliti perkembangan <i>value for money</i> yang terjadi di desa gunung megang

Sumber Penulis 2017

B. Landasan Teori

1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

a. Pengertian Anggaran dan APBDes

Menurut Deddi Nordiawan (2009 : 48) Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya kedalam kebutuhan – kebutuhan yang tidak

terbatas dimana pengertian tersebut mengungkapkan peran strategi anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik.

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2015 : 33) Anggaran Pendapatan belanja desa (APBDES) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana – rencana program yang dibiayai dengan uang desa, diman dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Sedangkan pengertian anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) menurut Abdul halim (2008:30) merupakan rencana kegiatan pemerintah daera yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

Berdasarkan pengertian para ahli diatas mengenai anggaran pendapatan belanja desa maka dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan belanja desa adalah suatu kegiatan dan aktivitas desa kepada masyarakat dalam mengelola keuangan untuk melaksanakan progam -progam pembangunan desa.

b. Fungsi Anggaran Desa

Anggaran disusun untuk mengalokasikan keuangan perusahaan agar memungkinkan tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. dimana menurut permendagri No.113 tahun 2014 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

V. Wiratna Sujarweni (2015 : 33 – 34) menjelaskan anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut :

1. Alat perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan, Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan yang digunakan untuk :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program, kegiatan serta sumber pendapatan
- c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun

2. Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa yang dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Alat Koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan desa

5. Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.

Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

c. Manfaat Anggaran Desa

Anggaran desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber – sumber dananya untuk pembangunan desa. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015 : 35) manfaat anggaran terbagi menjadi 5 yaitu :

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indicator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.

4. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa
5. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.

d. Prinsip – Prinsip Penganggaran Desa

Penggunaan anggaran Desa digunakan untuk pembangunan desa yang diarahkan pada program-program seperti pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Prinsip penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015 : 35) yaitu :

1. Transparasi

menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa

2. Akuntabilitas

menyangkut kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan pembangunan pemerintah desa.

3. Partisipasi masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintahan desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat

4. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
menyangkut keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran desa
5. Pemerintahan tanggap terhadap aspirasi yang berkembang dimasyarakat.

e. Komponen Dalam Anggaran

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015 : 35) komponen anggaran terdiri atas akun – akun sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. pendapatan desa dapat berasal dari :

a. Pendapatan Asli desa

- 1) Hasil usaha desa,
- 2) Hasil kekayaan desa
- 3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang.

4) Pendapatan lain – lain

b. Transfer

- 1) Dana Desa adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Bagi hasil pajak daerah / kabupaten / kota dan restribusi daerah
- 3) Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana pertimbangan pusat dan daerah yang diterima jabupaten untuk desa.
- 4) Bantuan keuangan APBD Pem.Prov,kab.Kota

2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. dimana belanja desa terdiri dari :

- a. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi beberapa jenis yaitu :

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan meliputi belanja pegawai (penghasilan tetap kepala desa, tunjangan kepala desa, tunjangan APBD)
 - 2) Operasional perkantoran meliputi belanja barang dan jasa serta belanja modal yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian / pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. pembelian / pengadaan barang / bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- b. Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa
 - c. Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan yang digunakan untuk pembinaan masyarakat desa
 - d. Belanja bidang pemberdayaan masyarakat yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa
 - e. Belanja bidang tak terduga yang digunakan untuk hal – hal yang tidak terduga kegiatan dalam keadaan darurat yang dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
3. Pembiayaan

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. pembiayaan mencakup :

- a. Penerimaan pembiayaan mencakup
 - 1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 2) mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan
 - 3) Pencarian dana cadangan yang digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan, dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membayar kegiatan diluar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan
 - 4) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan untuk digunakan dalam menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - 5) penerimaan pinjaman

- b. Pengeluaran pembiayaan mencakup :

Pembentukan dan penambahan dana cadangan, dana cadangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.

2. Pengukuran Kinerja

a. Pengertian Pengukuran Kinerja

Menurut Mahmudi (2007: 6) Pengukuran kinerja adalah suatu cara manajemen dalam menilai keefektifitasan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada sasaran, standard dan kriteria yang telah ditetapkan dalam sebuah anggaran. Tujuannya adalah untuk menilai hasil kerja sehingga dapat membantu manajer unit kerja dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Menurut Gusti Agung Rai (2008:17) Pengukuran kinerja adalah menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, progam atau kegiatan yang diperlukan untuk penilaian tingkat besarnya terjadi penyimpangan antara kinerja actual dan kinerja yang diharapkan. Dengan mengetahui penyimpangan tersebut maka dapat dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan kerja

Sedangkan menurut Deddi dan Ayuningtyas (2010 : 158) Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah progam / kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah penilaian atas kegiatan dan progam yang telah dilakukan apakah sesuai dengan standard dan sasaran yang dicapai guna untuk meningkatkandan memperbaiki kinerja.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja

Dasar pentingnya pengukuran kinerja terkait dengan tanggung jawab dalam memenuhi akuntabilitas dan harapan masyarakat dimana organisasi sektor publik bertanggung jawab atas penggunaan dana dan sumber daya dalam hal kesesuaiannya dengan prosedur, efisiensi dan ketercapaian tujuan.

Deddi dan Ayuningtyas (2011 : 158) menjelaskan Pengukuran kinerja memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik yang digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang semestinya, pimpinan dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan dengan cepat.

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja merupakan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi serta mewujudkan visi dan misinya, system pengukuran kinerja bertujuan memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi.

3. Memperbaiki kinerja periode- periode berikutnya

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan membentuk budaya berprestasi didalam organisasi.

4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan

Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk membawa reward atau sanksi kerja.

5. Memotivasi pegawai

Pengukuran kinerja bertujuan untuk meningkatkan motivasi pegawai dengan pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.

6. Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas public. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai seberapa bagus kinerja finansial organisasi.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dengan adanya pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi. Menurut Mardiasmo (2002: 122) Manfaat pengukuran kinerja antara lain :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan target serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

3. Pengukuran *Value For Money*

a. Pengertian *Value for money*

Menurut Mardiasmo (2002:4) *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efesiensi dan efektivitas secara skematis.

Sedangkan menurut Halim dan kusufi (2013 : 132) *Value for money* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sector public yang tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja tetapi menggunakan aspek non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu progam kerja sektor publik.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *value for money* merupakan penilaian kinerja dengan cara menggunakan aspek keuangan seperti ekonomi,efesiensi dan efektifitas dalam meningkatkan keberhasilan setiap kinerja dan non keuangan

b. Pengukuran *Value For Money*

Hal yang harus diperhatikan dalam mengukur kinerja *value for money* adalah memahami aktivitas opeasional organisasi dengan menganalisis progam dan kegiatan yang akan dilaksanakan. menurut Mardiasmo (2002 : 134-135) pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi (penghematan) merupakan praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga yang terbaik.

Suatu kegiatan operasional yang dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pegeluaran}} \times 100 \%$$

Berikut ini tingkat rasio ekonomis dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

Rasio Ekonomis	Kriteria Ekonomis
100 % - keatas	Sangat ekonomis
90 % - 100 %	Ekonomis
80 % - 90 %	Cukup Ekonomis
60 % - 80 %	Kurang ekonomis
Kurang dari 60 %	Tidak ekonomis

Sumber : Kepmendagri No.690 .900-327 tahun 1996

Dalam hal ekonomi merupakan ukuran yang relative perlu diperhatikan dalam pengukuran ekonomi antara lain :

- 1) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi
- 2) Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya organisasi sejenis yang dapat diperbandingkan

- 3) Apakah organisasi telah menggunakan menggunakan sumber daya finansial secara optimal.

Pada hakikatnya pengertian antara ekonomi dan efesiensi, menghendaki penghapusan atau penurunan biaya. Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar.

2. Pengukuran Efesiensi

Efesiensi (daya guna) dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu yang dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya. Indikator efesiensi mnggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100 \%$$

Efesiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan *value for money*. Efesiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efesiensi suatu organisasi.

Dimana efesiensi dinilai dengan kriteria sebagai berikut :

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100 % - keatas	Tidak Efesien
90 % - 100 %	Kurang Efesien
80 % - 90 %	Cukup Efesien
60 % - 80 %	Efisien
Kurang dari 60 %	Sangat Efesien

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996

Karena efesiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan, maka perbaikan efesiensi dapat dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan output pada tingkat input yang sama
2. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proposrsi peningkatan input
3. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama

3. Pengukuran Efektifitas

Efektifitas (hasil guna) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar. Efektifitas hanya melihat apakah suatu progam telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil Guna). Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Dimana efektifitas dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

Rasio Efisiensi	Kriteria Efektifitas
100 % - keatas	Tidak Efektifitas
90 % - 100 %	Kurang Efektifitas
80 % - 90 %	Cukup Efektifitas
60 % - 80 %	Efektifitas
Kurang dari 60 %	Sangat Efektifitas

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996

4. Outcome

Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu peran restrospektif dan prospektif.

4. Pelayanan Publik

a. Pengertian Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun 2009 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sedangkan menurut Ridwan dan Sudrajat (2009 : 19) Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas pelayanan publik adalah suatu penyelenggaraan kegiatan atau layanan yang dituju untuk masyarakat guna meningkatkan keinginan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

b. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.

Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009 : 103) Standar pelayanan merupakan ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima pelayanan. Adapun standar pelayanan yaitu meliputi :

a. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan

b. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan

c. Biaya Pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan

d. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

e. Sarana dan Prasarana

Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik

f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

c. Ruang Lingkup / Jenis – Jenis Pelayanan Publik

Ruang lingkup pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 yaitu :

1. Pelayanan Barang Publik
 - a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian dan seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan
 - c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan negara yang dipisahkan tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
2. Pelayanan Jasa Publik
 - a. Penyediaa jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.

- b. Penyedia jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendirinya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undang.
3. Pelayanan Administrasi
- a. Tindakan administrasi pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang – undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga,kehormatan, martabat dan harta benda warga negara.
 - b. Tindakan administrasi oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang – undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima layanan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut V Wiratna Sujarweni (2014 : 11) jenis penelitian diklasifikasikan berdasarkan tingkat eksplanasi dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing – masing variabel baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lain

2. Penelitian komperatif

Penelitian komperatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan variabel uang satu dengan variabel yang lain atau variabel satu dengan standar

3. Penelitian asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua vaiabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengetahui analisis pengukuran kinerja *Value for money* dalam mengelola APBDes guna meningkatkan pelayanan publik pada desa gunung megang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintahan desa gunung megang luar kabupaten muara enim yang berlokasi di jalan Locomotif no.222/2002/Dsn I gunung megang kecamatan gunung megang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh peneliti yang dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel peneliti sebelum dilakukan analisis.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Pengukuran kinerja Value for money	Suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sector publik yang tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja tetapi menggunakan aspek non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu progam kerja sector publik	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Ekonomis • Rasio Efesien • Rasio efektivitas • Outcome
2.	Pelayanan Publik	adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Barang • Pelayanan Jasa Publik • Pelayanan Administrasi

Sumber : Penulis 2017

D. Data yang diperlukan

Menurut V Wiratna Sujarweni (2014 : 73 - 74) berdasarkan sumber data terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuisioner, kelompok fokus dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan datanya tidak perlu diolah kembali dimana sumbernya terdapat didalam catatan, buku, majalah, artikel dan lain – lain.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer berupa data – data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung kepada staf desa gunung megang sedangkan data sekunder digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Sejarah singkat desa gunung megang
- b. Struktur organisasi desa gunung megang
- c. Visi dan misi desa gunung megang
- d. Pembagian tugas dan fungsi pemerintahan desa gunung megang
- e. Laporan anggaran dan realisasi belanja pemerintahan desa gunung megang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut V Wiratna Sujarweni (2014 : 74 - 75) teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara Tanya jawab baik secara bertatap muka ataupun tanpa menggunakan pedoman.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap Sesuatu yang tampak pada objek penelitian.

3. Survei

Survei adalah penelitian yang lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah – masalah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan bukan untuk pengembangan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang mengarah pada bukti konkret yang digunakan untuk menganalisis isi dari dokumen – dokumen yang dapat mendukung sebuah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada staf yang bersangkutan di desa gunung megang, Observasi yang dilakukan dengan melihat atau mengamati secara langsung objek yang

diteliti sedangkan Dokumentasi yang dilakukan dengan cara menyalin dan mengutip data yang terdapat di desa gunung megang

f. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Analisis Data Menurut V Wiratna Sujarweni (2014 : 6) analisis data terbagi menjadi dua yaitu :

a. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan ataupun perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, masyarakat dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data berupa angka dimana penemuan – penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau pengukuran.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif berupa data yang telah tersedia di desa gunung megang seperti pembagian tugas desa gunung megang , sejarah singkat dll. sedangkan data kuantitatifnya berupa kumpulan atau daftar yang berbentuk angka seperti laporan anggaran realisasi pendapatan belanja desa (APBDes)

2. Teknik analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan menganalisis melalui penjelasan – penjelasan yang ada yang didasarkan pada teori – teori yang ada khususnya mengenai rasio ekonomi, efisien, efektif dan outcome.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang Luar Kabupaten Muara Enim

Pada tahun 1974 mulailah berdiri Kantor Desa yang terbentuk limas dari kayu bertiang (panggung) yang bertempat di dusun II lalu di tahun 1980 – 2000 terjadi perkebangan wilayah pemukiman warga pada waktu itu banyak warga masyarakat membuat rumah dipinggir jalan negara sedangkan pada tahun 1984 dusun berubah menjadi desa karena dihapusnya pemerintahan marga (marga legi) yang dipimpin oleh kepala desa dan kemet / kampung berubah menjadi dusun yang disusun oleh kepala dusun (KADUS) dan pada tahun 1997 kantor kepala desa yang berpindah tempat dan berubah bentuk bangunannya dari bangunan yang terdiri dari kayu dan panggung menjadi kontruksi beton yang bertempat tinggal di Dusun 1 dan wilayah Dusun dari 3 (tiga) Dusun menjadi 5 (lima) Dusun / Desa.

Sampai skarang kantor Pemerintahan Desa Gunug Megang Luar yang masih tetap berdiri dan pelayanan masyarakat aktif setiap hari kerja yang dipimpin oleh Kepala Desa (Mustadirin).

2. Tugas Dan Fungsi Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang

a. Tugas Pemerintahan Desa Gunung Megang

Pemerintahan Desa Gunung Megang mempunyai tugas pokok melakukan urusan Desa Gunung Megang dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa gunung megang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan kegiatan sekretariat yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, penyusunan progam, evaluasi dan laporan
- 2) Perencanaan untuk mempersiapkan, mengelola, menelaah, penyusunan rumusan kebijakan teknis serta progam kerja
- 3) Pengelolaan data dan pelaksanaan pembinaan pembangunan desa
- 4) Pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangnan bidang sosial yang meliputi :
 - a. Menanggulangi / menangani masalah sosial lainnya yang timbul dan berkembang dilingkungan masyarakat
 - b. Membina, mengembangkan potensi sumber sosial
- 5) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya
- 6) Pelaksanaan lain yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Visi dan Misi Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang

a. Visi Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang

Visi kantor pemerintahan desa gunung megang adalah terwujudnya kesejahteraan suatu organisasi dimasa depan untuk semua warga dan masyarakat melalui peran aktif dalam pembangunan desa gunung megang.

b. Misi Pemerintahan Desa Gunung Megang

- 1) Pemberdayaan dan pemberian kesempatan terhadap sumber dan potensi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan masalah – masalah kemasyarakatan
- 2) Memelihara dan memperkuat ketahanan sosial dan integritas sosial dengan memperkokoh semangat, kesetiakawanan sosial dan kemitraan antar berbagai lapisan masyarakat
- 3) Mengembangkan prakarsa dan peran serta masyarakat termasuk warga maupun sektor usaha sebagai investasi modal sosial melalui penyuluhan sosial yang terpadu dan berkelanjutan
- 4) Meningkatkan aksesibilitas ke desa yang masih terisolasi dalam rangka pemerataan pembangunan

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gunung Megang

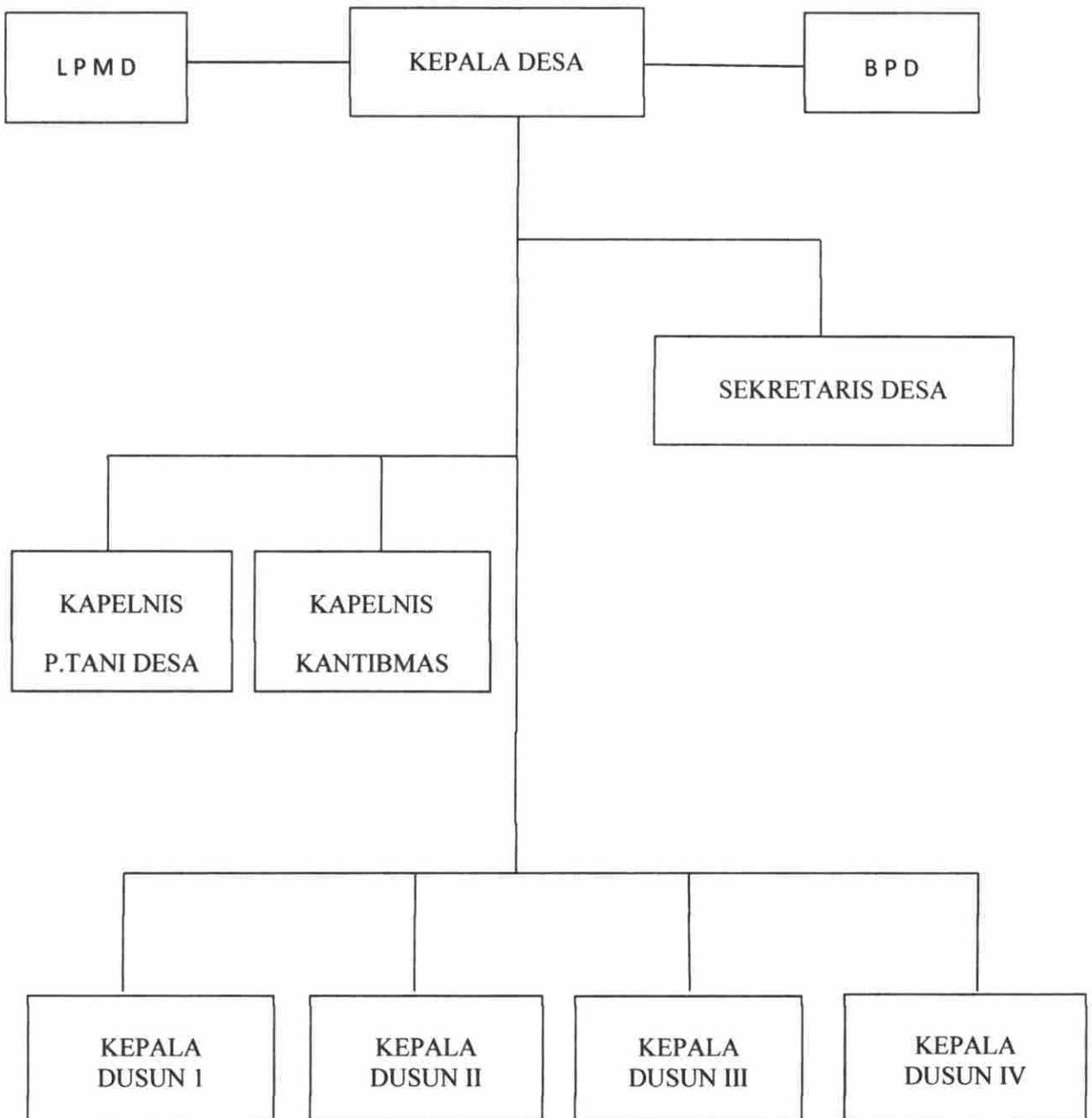
Organisasi merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana dalam setiap aktifitas yang dilakukan dalam organisasi terdapat hubungan antara orang – orang yang melakukan aktivitas tersebut. Semakin banyak orang yang melakukan aktifitas maka semakin kompak pada hubungan yang terjalin. Oleh karena itu diperlukan pembagian tugas – tugas yang disusun dalam sebuah bentuk struktur organisasi.

Dalam menjalankan tugas sebagai pemerintahan desa gunung megang yang memiliki struktur organisasi vertikal kebawah yang artinya wewenang dan tanggungjawab secara vertikal antara atasan dan bawahan

Struktur organisasi merupakan suatu hubungan antara tiap bagian atau posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan yang diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa jadi ada satu pertanggungjawaban apa yang akan dikerjakan.

Dalam Permendagri No.113 tahun 2014 tentang standar akuntansi pemerintahan, Struktur organisasi pemerintahan desa gunung megang pada bagan 4.1 sebagai berikut:

Gambar IV.I
STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA GUNUNG MEGANG



Sumber : Sekretariat Desa Gunung Megang 2017

Adapun tugas dan fungsi masing-masing bagian dari Pemerintahan Desa Gunung Megang Luar adalah sebagai berikut:

1) Kepala Desa

Mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa serta pengelolaan kesekretariatan adinas dalam melaksanakan tugasnya kepala desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan
- b. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undang
- c. Pengolahan data, perencanaan progam dan pelaksanaan tugas dibidang pebangunan sosial
- d. Pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas dibidng pembangunan sosial'
- e. Pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang sosial yang meliputi :
 1. Menanggulangi / menangani masalah kesejahteraan sosial dan masalah sosial kemasyarakatan yang timbul dan berkembang di lingkungan masyarakat;
 2. Membina, mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

g. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

2) Sekretariat Kantor Desa Gunung Megang Luar

Sekretaris mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan bawahannya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga pemberdaya masyarakat desa merupakan wadah partisipatif masyarakat desa sebagai mitra pemerintahan desa.

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan Menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

b. Badan permusyawaratan desa berhak:

1. Mengajukan usulan rencana pengajuan desa;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Memilih dan dipilih; dan

4. Mendapat tunjangan dari Anggran Pendapatan Belanja Desa.
- 5) Kapelnis kantibnas bertugas sebagai berikut:
 - a. Membantu dalam menanggulangi bencana;
 - b. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu;
 - d. Membantu upaya pertahanan Negara;
 - e. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Co. Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat kabupaten melalui camat.

5. Kepegawaian Pemerintahan Desa Gunung Megang Luar

Untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang ada di lingkungan desa gunung megang luar kabupaten muara enim sekarang ini, di kantor pemerintahan desa gunung megang mempunyai 20 orang pegawai/sumber daya manusia, yang terdiri dari 1 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 orang Tenaga Harian Lepas (THL) seperti tabel berikut

Tabel IV.II

**Pegawai Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang Berdasarkan Sub
Bagian dan Bidang Kerja Tahun 2015**

No	Sub Bagian / Bidang Kerja	Jumlah (Orang)
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	LPMD	6
4	BPD	6
5	Kadus I	1
6	Kadus II	1
7	Kadus III	1
8	Kadus IV	1
9	Kadus V	1
	Jumlah	20

Sumber : Sekretariat Desa Gunung Megang 2017

Tabel IV.III

**Pegawai Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang Luar
Berdasarkan Jejang Pendidikan Tahun 2015**

No	Keterangan	Pendidikan				
		S2	S1	D III	SMA	SMP
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2	3	-	-	-
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	-	-	5	10	-
	Jumlah	2	3	5	10	-

Sumber : Sekretariat Desa Gunung Megang 2017

Tabel IV.IV

Pegawai Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang Luar**Berdasarkan Usia Tahun 2015**

No	Usia	Jumlah (orang)
1	Usia 20-29	5
2	Usia 30-39	10
3	Usia 40-49	5
	Jumlah	20

Sumber : Sekretariat Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang 2017

6. Pejabat terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran belanja desa adalah pengeluaran rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Pejabat terkait dengan belanja desa yaitu :

- 1) Pengguna Anggaran (PA)
- 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- 5) Bendahara Pengeluaran

Adapun uraian masing-masing dari pejabat terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah sebagai berikut :

1) Pengguna Anggaran (PA)

Setiap akhir tahun anggaran, Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Gunung Megang Luar, dengan menunjuk pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Desa Gunung Megang Luar dengan surat keputusan. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa Gunung Luar yang dipimpinnya.

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Desa, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Menyusun pemerintah desa;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. Melaksanakan anggaran pemerintah desa yang dipimpin;
- d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- e. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah desa yang dipimpinnya;
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran pemerintah desa yang dipimpinnya;
- h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Desa;
- i. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;

j. Mengelola barang milik Desa/kekayaan desa yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa;

k. Menanda tangani SPM.

2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna dalam melaksanakan sebagai tugas dan fungsi pemerintah desa.

Kuasa pengguna anggaran mempunyai tugas :

- a. Menyusun RKA-pemerintahan desa dan DPA-pemerintahan desa sesuai dengan pelimpahan kewenangannya;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja unuk belanja tambahan uang (TU) dan langsung (RS);
- c. Melaksanakan anggaran pemerintahn desa sesuai dengan pelimpahan kewenangannya;
- d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran sesuai dengan kewenangannya ;
- e. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak sesuai dengan pelimpahan kewenangannya;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran pemerintahan desa sesuai dengan pelimpahan kewenangannya;

- g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang di limpakan oleh kepala Pemerintahan Desa Gunung Megang Luar;
- h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Pemerintah Desa Gunung Megang Luar.

3) Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK)

Merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja desa, dalam hal PA belum menetapkan PPK maka KPA bertindak sebagai PPK.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- a. Menetapkan rencana pelaksana pengadaan Barang/Jasa;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Menyediakan Barang/Jasa;
- c. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada pengguna Anggaran;
- d. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Merupakan pejabat pada unit kerja Pemerintahan Desa Gunung Megang Luar yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya antara lain :

- a. Mengendalikan pelaksana kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

5) Bendahara Pengeluaran (BP)

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang Luar.

Bendahara pengeluaran mempunyai tugas:

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP LS;
- b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
- c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang di kelolanya atas persetujuan pengguna Anggaran;
- d. Menolak perintah bayar dari pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e. Membuat laporan pertanggungjawaban pengguna uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan paling lambar 10 bulan berikutnya kepada Pengguna Anggaran dilengkapi bukti-bukti pengeluaran yang sah, bukti atas penyeteroran PPN/PPh ke atas negara, dan register penutup kas.

7. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pada Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang

Anggaran Belanja yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan semua orang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Gunung Megang . Namun dalam pelaksanaannya, suatu anggaran sangat sulit untuk dapat di realisasikan 100%. Berikut ini penulis akan menyajikan anggaran belanja Kantor pemerintahan Desa Gunung Megang untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.V
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2011

Kode Rekening					Uraian	Anggaran	Realisasi
1					Pendapatan		
1	1				Sisa Lebih tahun lalu dari anggaran PAD	Rp 31,502,600	Rp 31,502,600
1	1	1			Pendapatan Asli Desa		
1	1	2			Hasil Usaha Desa	Rp 1,600,000	Rp 1,200,000
1	1	3			Lain - lain Pendapatan asli desa yang sah	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
1	4				Bantuan Keuangan Pemeintah Provinsi,Kabupaten / kota		
1	4	1			Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp 70,000,000	Rp 70,000,000
1	5				Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		
1	5	1			Bantuan dari provinsi	Rp 20,000,000	Rp 29,710,000
1	5	2			Bantuan dari kabupaten	Rp 82,940,000	Rp 38,000,000
					Jumlah Pendapatan	Rp 216,042,600	Rp 180,412,600
2					Belanja		
2	1				Belanja Langsung		
2	1	1			Belanja Pegawai / Honorarium	Rp 3,715,000	Rp 1,500,000
2	1	1	2		Honor / Upah Harian		
2	1	1	2	2	Transportasi Peserta	Rp 700,000	Rp 250,000
2	1	1	2	4	Ongkos Tukang	Rp 500,000	Rp 150,000
2	1	2			Belanja Barang dan jasa	Rp 15,000,000	Rp 24,200,000
2	1	2	1		Belanja Perjalanan Dinas		
2	1	2	1	2	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan	Rp 1,254,000	Rp 500,000
2	1	2	1	3	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten	Rp 4,000,000	Rp 2,610,000
2	1	2	3		Belanja Bahan Pakai Habis		

2	1	2	3	1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 2,300,000	Rp 900,000
2	1	2	4		Belanja Jasa Kantor		
2	1	2	4	4	Belanja Surat Kabar / Majalah	Rp 500,000	Rp 350,000
2	1	2	4	10	Belanja Buku Cadangan	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
2	1	2	4	11	Belanja Pembayaran Rekening Listrik	Rp 500,000	Rp 890,000
2	1	2	5		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
2	1	2	5	1	Belanja Jasa Service	Rp 100,000	Rp 100,000
2	1	2	5	2	Belanja Penggantian Suku Cadangan	Rp 30,000	Rp 100,000
2	1	2	5	3	Belanja Bahan Bakar / Gas dan Pelumas	Rp 247,000	Rp 246,000
2	1	2	6		Belanja Cetak dan Penggandaan		
2	1	2	6	2	Belanja Penggandaan	Rp 1,000,000	Rp 1,800,000
2	1	2	10		Belanja Makan dan Minuman		
2	1	2	10	2	Belanja Makan dan Minuman Rapat	Rp 2,000,000	Rp 2,100,000
2	1	2	10	4	Belanja Makan dan Minuman Gotong Royong	Rp 780,000	Rp 700,000
2	1	2	10	5	Biaya Makanan Tampahan Balita	Rp 500,000	Rp 2,000,000
2	1	2	11		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
2	1	2	11	1	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp 1,000,000	Rp 400,000
2	1	2	12		Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu		
2	1	2	11	1	Belanja Pakaian Olah Raga	Rp 900,000	Rp 800,000
2	1	2	12	4	Belanja Pakaian Seragam PKK	Rp 1,698,000	Rp 1,500,000
2	1	3			Belanja Modal	Rp 31,890,000	Rp 30,000,000
2	1	3	4	3	Belanja Modal Penggandaan Filling Kabinet	Rp 1,900,000	Rp 1,000,000
2	1	3	4	6	Belanja Modal Perlengkapan PKK	Rp 200,000	Rp 250,000
2	1	3	5		Belanja Modal Penggandaan Komputer		
2	1	3	5	2	Belanja Modal Penggandaan Komputer note book	Rp 2,800,000	Rp 2,000,000
2	1	3	5		Belanja Modal Penggandaan Meubeller		
2	1	3	6	7	Belanja Modal Penggandaan Kursi Plastik	Rp 672,000	Rp 500,000
2	1	3	6	11	Belanja Modal Penggandaan Terpal Kain	Rp 200,000	Rp 250,000
2	1	3	9		Belanja Modal Penggandaan Kontruksi Jalan		
2	1	3	9	5	Belanja Modal Pembuatan jalan Setapak	Rp 18,168,000	Rp 16,000,000
2	1	3	13		Belanja Modal Penggandaan Kontruksi		
2	1	3	13	3	Belanja Modal Perebahan Rumah Keranda TPU	Rp 2,870,000	Rp 4,000,000
2	2				Belanja Tidak Langsung	Rp 43,500,000	Rp 33,000,000
2	2	1			Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap		
2	2	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa	Rp 34,900,000	Rp 22,284,000
2	2	1	2		Penghasilan Tetap BPD	Rp 14,000,000	Rp 7,000,000
2	2	2			Tambahan Penghasilan Aparat Desa		
2	2	2	1		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp 450,000	Rp 450,000
					Jumlah Belanja	Rp 189,274,000	Rp 158,830,000

Sumber : Sekretariat Desa Gunung Megang 2017

Tabel IV.VI
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2012

Kode Rekening					Uraian	Anggaran	Realisasi
1					Pendapatan		
1	1				Pendapatan Asli Desa		
1	1	1			Hasil Usaha Desa	Rp. 4,800,000	Rp. 2,000,000
1	1	3			Hasil Gotong royong		
1	1	4			Lain - lain Pendapatan asli desa yang sah	Rp. 10,000,000	Rp. 6,100,000
1	2				Bagi Hasil Pajak		
1	3				Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1	3	1			Alokasi dana Desa	Rp. 166,530,000	Rp. 150,000,000
1	4				Bantuan Keuangan Pemeintah Provinsi, Kabupaten / kota		
1	4	1			Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp. 24,700,000	Rp. 37,200,000
1	5				Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		
1	5	1			Bantuan dari provinsi	Rp. 36,000,000	Rp. 29,710,000
1	5	2			Dana Penghasilan tetap dan tambahan kepala desa, Perangkat desa dan BPD	Rp. 55,300,000	Rp. 38,000,000
					Jumlah Pendapatan	Rp. 297,330,000	Rp. 263,010,000
2					Belanja		
2	1				Belanja Langsung	Rp. 5,575,000	Rp. 2,575,000
2	1	1			Belanja Pegawai / Honorarium		
2	1	1	1		Honor Tim / Panitia		
2	1	1	2		Honor / Upah Harian		
2	1	1	2	2	Transportasi Peserta	Rp. 1,100,000	Rp. 900,000
2	1	1	2	4	Ongkos Tukang	Rp. 1,200,000	Rp. 1,000,000
2	1	2			Belanja Barang dan jasa	Rp. 15,000,000	Rp. 11,000,000
2	1	2	1		Belanja Perjalanan Dinas		
2	1	2	1	2	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan	Rp. 3,470,000	Rp. 3,470,000
2	1	2	1	3	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten	Rp. 5,720,000	Rp. 5,720,000
2	1	2	3		Belanja Bahan Pakai Habis		
2	1	2	3	1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 2,894,000	Rp. 2,000,000
2	1	2	4		Belanja Jasa Kantor		
2	1	2	4	4	Belanja Surat Kabar / Majalah	Rp. 792,000	Rp. 500,000
2	1	2	4	10	Belanja Buku Cadangan	Rp. 700,000	Rp. 500,000
2	1	2	4	11	Belanja Pembayaran Rekening Listrik	Rp. 1,500,000	Rp. 500,000
2	1	2	5		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
2	1	2	5	1	Belanja Jasa Service	Rp. 100,000	Rp. 100,000
2	1	2	5	2	Belanja Penggantian Suku Cadangan	Rp. 200,000	Rp. 200,000
2	1	2	5	3	Belanja Bahan Bakar / Gas dan Pelumas	Rp. 800,000	Rp. 400,000
2	1	2	6		Belanja Cetak dan Peggandaan		
2	1	2	6	2	Belanja Peggandaan	Rp. 1,788,000	Rp. 1,000,000
2	1	2	10		Belanja Makan dan Minuman		
2	1	2	10	2	Belanja Makan dan Minuman Rapat	Rp. 3,265,000	Rp. 2,000,000
2	1	2	10	4	Belanja Makan Minuman Gotong Royong	Rp. 2,350,000	Rp. 1,400,000
2	1	2	10	5	Biaya Makanan Tampahan Balita	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
2	1	2	11		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		

2	1	2	11	1	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp. 2,000,000	Rp. 1,000,000
2	1	2	12		Belanja Pakaian Khusus dan Hari Tertentu		
2	1	2	11	1	Belanja Pakaian Olah Raga	Rp. 936,000	Rp. 500,000
2	1	2	12	4	Belanja Pakaian Seragam PKK	Rp. 2,600,000	Rp. 1,700,000
2	1	3			Belanja Modal	Rp. 49,670,000	Rp. 30,005,000
2	1	3	4		Belanja Modal Penggandaan Perlengkapan Kantor		
2	1	3	4	3	Belanja Modal Penggandaan Filling Kabinet	Rp. 2,600,000	Rp. 2,600,000
2	1	3	4	6	Belanja Modal Perlengkapan PKK	Rp. 500,000	Rp. 500,000
2	1	3	4	7	Belanja Modal Perlengkapan Olah Raga	Rp. 3,000,000	Rp. 3,000,000
2	1	3	5		Belanja Modal Penggandaan Komputer		
2	1	3	5	2	Belanja Modal Penggandaan Komputer note book	Rp. 4,800,000	Rp. 4,800,000
2	1	3	5		Belanja Modal Penggandaan Meubeller		
2	1	3	6	7	Belanja Modal Penggandaan Kursi Plastik	Rp. 1,620,000	Rp. 1,620,000
2	1	3	6	11	Belanja Modal Penggandaan Terpal Kain	Rp. 400,000	Rp. 1,000,000
2	1	3	9		Belanja Modal Penggandaan Kontruksi Jalan		
2	1	3	9	5	Belanja Modal Pembuatan jalan Setapak	Rp. 26,410,000	Rp. 20,000,000
2	1	3	13		Belanja Modal Penggandaan Kontruksi		
2	1	3	13	3	Belanja Modal Perebahan Rumah Keranda TPU	Rp. 5,700,000	Rp. 4,000,000
2	2				Belanja Tidak Langsung	Rp. 37,000,000	Rp. 25,000,000
2	2	1			Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap		
2	2	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa	Rp. 36,200,000	Rp. 28,000,000
2	2	1	2		Penghasilan Tetap BPD	Rp. 17,830,000	Rp. 18,140,000
2	2	2			Tambahan Penghasilan Aparat Desa		
2	2	2	1		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp. 1,000,000	Rp. 1,000,000
					Jumlah	Rp. 240,720,000	Rp. 178,130,000

Sumber : Sekretariat Desa Gunung Megang 2017

Tabel IV.VII
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2013

Kode Rekening					Uraian	Anggaran	Realisasi
1					Pendapatan		
1	1				Pendapatan Asli Desa		
1	1	1			Hasil Usaha Desa	Rp. 7,200,000	Rp. 6,500,000
1	1	2			Hasil Pengelolaan kekayaan desa/pasar/kalangan		
1	1	3			Lain - lain Pendapatan asli desa yang sah	Rp. 22,500,000	Rp. 16,300,000
1	2				Bagi Hasil Pajak		
1	3				Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1	3	1			Alokasi dana Desa	Rp. 276,031,560	Rp. 186,104,000
1	4				Bantuan Keuangan Pemeintah Provinsi,Kabupaten / kota		
1	4	1			Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp. 54,800,000	Rp. 58,000,000
1	5				Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		
1	5	1			Bantuan dari provinsi	Rp. 71,940,000	Rp. 41,760,000
1	5	2			Dana Penghasilan tetap dan tambahan kepala desa,Perangkat desa dan BPD	Rp. 83,400,000	Rp. 71,000,000
1	5	3			Dana Kegiatan Asuransi Perangkat Desa dan BPD	Rp. 10,500,000	Rp. 5,000,000
					Jumlah Pendapatan	Rp. 526,371,560	Rp. 384,664,000
2					Belanja		
2	1				Belanja Langsung	Rp. 9,475,000	Rp. 10,000,000
2	1	1			Belanja Pegawai / Honorarium		
2	1	1	1		Honor Tim / Panitia		
2	1	1	1	1	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp. 1,475,000	Rp. 2,000,000
2	1	1	2		Honor / Upah Harian		
2	1	1	2	2	Transportasi Peserta	Rp. 4,000,000	Rp. 3,700,000
2	1	2			Belanja Barang dan jasa	Rp. 49,433,000	Rp. 45,500,000
2	1	2	1		Belanja Perjalanan Dinas		
2	1	2	1	2	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan	Rp. 9,310,000	Rp. 8,000,000
2	1	2	1	3	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten	Rp. 11,720,000	Rp. 5,785,000
2	1	2	3		Belanja Bahan Pakai Habis		
2	1	2	3	1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 9,492,000	Rp. 8,500,000
2	1	2	4		Belanja Jasa Kantor		
2	1	2	4	4	Belanja Surat Kabar / Majalah	Rp. 1,620,000	Rp. 1,620,000
2	1	2	4	10	Belanja Buku Cadangan	Rp. 4,000,000	Rp. 4,000,000
2	1	2	5		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
2	1	2	5	1	Belanja Jasa Service	Rp. 400,000	Rp. 700,000
2	1	2	5	2	Belanja Penggantian Suku Cadangan	Rp. 3,200,000	Rp. 3,500,000
2	1	2	5	3	Belanja Bahan Bakar / Gas dan Pelumas	Rp. 5,200,000	Rp. 5,000,000
2	1	2	6		Belanja Cetak dan Peggandaan		
2	1	2	6	2	Belanja Peggandaan	Rp. 5,475,000	Rp. 5,000,000
2	1	2	10		Belanja Makan dan Minuman		
2	1	2	10	2	Belanja Makan dan Minuman Rapat	Rp. 5,450,000	Rp. 5,000,000
2	1	2	10	4	Belanja Makan dan Minuman Gotong Royong	Rp. 5,350,000	Rp. 5,350,000
2	1	2	10	5	Biaya Makanan Tampahan Balita	Rp. 8,600,000	Rp. 7,000,000
2	1	3			Belanja Modal	Rp. 52,148,000	Rp. 53,000,000

2	1	3	3		Belanja Modal Penggandaan Peralatan Kantor		
2	1	3	3	7	Belanja Modal Pengadaan AC	Rp. 2,400,000	Rp. 1,900,000
2	1	3	4		Belanja Modal Perlengkapan		
2	1	3	4	1	Belanja Modal Penggandaan Almari	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
2	1	3	4	4	Belanja Modal Penggandaan White board	Rp. 1,500,000	Rp. 1,000,000
2	1	3	4	6	Belanja Modal Perlengkapan PKK	Rp. 2,100,000	Rp. 1,000,000
2	1	3	4	7	Belanja Modal Perlengkapan Olah Raga	Rp. 3,000,000	Rp. 3,000,000
2	1	3	4	8	Belanja Modal Perlengkapan Papan Nama	Rp. 1,000,000	Rp. 1,500,000
2	1	3	6		Belanja Modal Penggandaan Meubeller		
2	1	3	6	3	Belanja Modal Penggandaan Kursi Kerja	Rp. 3,000,000	Rp. 3,000,000
2	1	3	6	7	Belanja Modal Penggandaan Kursi Plastik	Rp. 3,300,000	Rp. 3,300,000
2	1	3	6	9	Belanja Modal Penggandaan Tenda uk. 6 x 6m	Rp. 10,000,000	Rp. 7,000,000
2	1	3	9		Belanja Modal Penggandaan Kontruksi Jalan		
2	1	3	9	1	Belanja Modal Penggandaan Kontruksi Jalan	Rp. 17,325,000	Rp. 17,000,000
2	1	3	9	5	Belanja Modal Pembuatan Jalan Setapak	Rp. 5,777,000	Rp. 6,700,000
2	1	3	13		Belanja Modal Pengadaan Kontruksi		
2	1	3	13		Belanja Modal Pembuatan Bangku Stadion	Rp. 3,000,000	Rp. 3,000,000
2	2				Belanja Tidak Langsung	Rp. 84,195,000	Rp. 79,385,000
2	2	1			Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap		
2	2	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 45,800,000	Rp. 44,000,000
2	2	1	2		Penghasilan Tetap BPD	Rp. 27,600,000	Rp. 32,900,000
2	2	2			Tambahan Penghasilan Aparat Desa		
2	2	2	1		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp. 14,000,000	Rp. 14,000,000
2	2	5			Belanja Bantuan Keuangan		
2	2	5	1		Kegiatan Asuransi Desa dan BPD	Rp. 12,770,000	Rp. 10,000,000
					Jumlah	Rp. 425,115,000	Rp. 404,340,000

Sumber : Sekretariat Desa Gunung Megang 2017

Tabel IV.VIII
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2014

Kode Rekening					Uraian	Anggaran	Realisasi
1					Pendapatan		
1	1				Pendapatan Asli Desa		
1	1	2			Hasil Pengelolaan kekayaan desa/pasar/kalangan	Rp. 21,400,000	Rp. 18,300,000
1	1	3			Hasil sewa tenda / panggung	Rp. 2,500,000	Rp. 2,000,000
1	1	6			Lain - lain Pendapatan asli desa yang sah	Rp. 20,050,000	Rp. 22,000,000
1	2	2			Bagi Hasil Pajak		
1	3	3			Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1	3	1			Alokasi dana Desa	Rp. 484,920,000	Rp. 301,637,000
1	4	2			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		
1	4	3			Bantuan dari provinsi	Rp. 180,000,000	Rp. 180,000,000
1	4	4			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp. 155,000,000	Rp. 145,000,000
1	4	5			Dana Penghasilan tetap dan tambahan kepala desa,Perangkat desa dan BPD	Rp. 114,000,000	Rp. 100,000,000
1	4	6			Bantuan Keuangan Desa lainnya		
					Jumlah Pendapatan	Rp. 822,870,000	Rp. 768,937,000
2					Belanja		
2	1				Belanja Langsung	Rp. 13,000,000	Rp. 10,000,000
2	1	1			Belanja Pegawai / Honorarium		
2	1	1	1		Honor Tim / Panitia	Rp. 2,890,000	Rp. 4,000,000
2	1	1	2		Honor / Upah Harian		
2	1	1	2	2	Transportasi Peserta	Rp. 10,000,000	Rp. 9,000,000
2	1	2			Belanja Barang dan jasa	Rp. 67,186,000	Rp. 75,000,000
2	1	2	1		Belanja Perjalanan Dinas		
2	1	2	1	2	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan	Rp. 17,380,000	Rp. 12,000,000
2	1	2	1	3	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten	Rp. 20,760,000	Rp. 15,000,000
2	1	2	3		Belanja Bahan Pakai Habis		
2	1	2	3	1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 24,835,000	Rp. 25,000,000
2	1	2	4		Belanja Jasa Kantor		
2	1	2	4	4	Belanja Surat Kabar / Majalah	Rp. 2,520,000	Rp. 3,000,000
2	1	2	4	9	Belanja Permainan Anak - anak	Rp. 1,500,000	Rp. 2,000,000
2	1	2	4	10	Belanja Buku bacaan	Rp. 1,500,000	Rp. 3,000,000
2	1	2	4	11	Belanja Penambahan beban daya amper PLN	Rp. 7,000,000	Rp. 10,000,000
2	1	2	4	12	Belanja Pembayaran Rekening Listrik	Rp. 11,110,000	Rp. 15,000,000
2	1	2	4	13	Belanja Rekening PAM	Rp. 5,742,000	Rp. 3,500,000

2	1	2	4	14	Belanja Jaga Keamanan dan kebersihan Kantor	Rp. 3,000,000	Rp. 3,000,000
2	1	2	5		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp. 5,000,000	Rp. 9,700,000
2	1	2	5	1	Belanja Jasa Service	Rp. 3,000,000	Rp. 3,000,000
2	1	2	5	2	Belanja Penggantian Suku Cadangan	Rp. 4,000,000	Rp. 4,000,000
2	1	2	5	3	Belanja Bahan Bakar / Gas dan Pelumas	Rp. 7,500,000	Rp. 9,000,000
2	1	2	6		Belanja Cetak dan Penggandaan		
2	1	2	6	2	Belanja Penggandaan	Rp. 12,786,000	Rp. 20,000,000
2	1	2	10		Belanja Makan dan Minuman		
2	1	2	10	2	Belanja Makan dan Minuman Rapat	Rp. 7,820,000	Rp. 8,500,000
2	1	2	10	4	Belanja Makan dan Minuman Gotong Royong	Rp. 7,210,000	Rp. 10,000,000
2	1	2	10	5	Biaya Makanan Tampahan Balita	Rp. 10,000,000	Rp. 13,000,000
2	1	2	10	6	Belanja konsumsi perangkat desa setiap hari kerja	Rp. 14,500,000	Rp. 35,000,000
2	1	3			Belanja Modal		
2	1	3	3	1	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	Rp. 10,807,000	Rp. 5,000,000
2	1	3	3	2	Pengadaan lapangan tenis meja	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
2	1	3	4		Belanja Modal Perlengkapan kantor		
2	1	3	4	1	Belanja modal pakaian dinas perangkat desa	Rp. 8,000,000	Rp. 8,000,000
2	1	3	4	2	Belanja modal pengadaan media TV	Rp. 3,000,000	Rp. 3,000,000
2	1	3	4	3	Belanja Modal Konstum 8 lusin	Rp. 2,080,000	Rp. 20,800,000
2	1	3	4	4	Belanja modal pengadaan bola kaki dan voly	Rp. 1,000,000	Rp. 1,000,000
2	1	3	4	5	Belanja modal pengadaan pakaian seragam	Rp. 5,000,000	Rp. 2,000,000
2	1	3	4	6	Belanja modal perlengkapan olahraga	Rp. 1,000,000	Rp. 800,000
2	1	3	4	7	Belanja Modal Penggandaan Komputer note book	Rp. 6,000,000	Rp. 2,000,000
2	1	3	4	8	Belanja modal perlengkapan dapur TP - PKK	Rp. 10,000,000	Rp. 5,000,000
2	1	3	4	9	Belanja modal alat kebersihan kantor	Rp. 1,500,000	Rp. 1,000,000
2	1	3	4	10	Belanja modal pengadaan papan nama kades	Rp. 1,000,000	Rp. 600,000
2	1	3	4	11	Belanja modal pengadaan papan struktur desa	Rp. 600,000	Rp. 500,000
2	1	3	4	12	Belanja modal pengadaaan papan struktur LMPD	Rp. 800,000	Rp. 600,000
2	1	3	6		Belanja Modal Penggandaan Meubeller		
2	1	3	6	1	Belanja modal lemari arsip	Rp. 3,500,000	Rp. 2,000,000
2	1	3	6	2	Belanja modal meja tulis 4 buah	Rp. 2,000,000	Rp. 5,000,000
2	1	3	6	3	Belanja modal kursi tamu	Rp. 3,000,000	Rp. 3,000,000
2	1	3	6	4	Belanja modal kursi putar 2 buah	Rp. 2,500,000	Rp. 2,000,000
2	1	3	13		Belanja Modal Penggandaan Kontruksi Jalan		
2	1	3	13	1	Belanja modal pembangunan wc kantor kades	Rp. 24,830,000	Rp. 12,181,000

2	1	3	13	2	Belanja modal renovasi pintu dan jendela	Rp. 16,400,000	Rp. 11,000,000
2	1	3	13	3	Belanja modal pengadaan jaringan air bersih	Rp. 12,170,000	Rp. 9,700,000
2	1	3	13	4	Belanja modal renovasi jembatan gantung	Rp. 45,378,000	Rp. 35,000,000
2	1	3	13	5	Pengadaan panggung permanen	Rp. 33,800,000	Rp. 25,000,000
2	2				Belanja Tidak Langsung	Rp. 162,500,000	Rp. 182,110,000
2	2	1			Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap		
2	2	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa	Rp. 69,000,000	Rp. 65,000,000
2	2	1	2		Penghasilan Tetap BPD	Rp. 45,000,000	Rp. 45,000,000
2	2	2			Tambahan Penghasilan Aparat Desa	Rp. 68,600,000	Rp. 46,560,000
2	2	2	1		Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Rp. 30,000,000	Rp. 30,000,000
2	2	2	2		Tambahan penghasilan P3N,LPMD imam, limnas desa	Rp. 53,710,000	Rp. 46,760,000
2	2	2			Belanja Bantuan keuangan		
2	2	2	1		Tambahan asuransi perangkat desa	Rp. 14,700,000	Rp. 16,000,000
					Jumlah	Rp. 900,114,000	Rp. 890,311,000

Sumber : Sekretariat Desa Gunung Megang 2017

Tabel IV.IX
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2015

Kode Rekening					Uraian	Anggaran	Realisasi
1					Pendapatan		
1	1				Pendapatan Asli Desa		
1	1	1			Hasil Usaha	-	-
1	1	2			Lain - lain Pendapatan asli desa yang sah	Rp. 31,250,000	Rp. 21,250,000
1	1	3			Pendapatan Transfer		
1	1	4			Dana Desa	Rp. 396,721,000	Rp. 295,000,000
1	1	5			Bagian dari Hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten / kota		
1	1	6			Alokasi Dana Desa	Rp. 540,940,000	Rp. 350,000,000
1	1	7			Bantuan Keuangan		
1	1	8			Bantuan Provinsi	Rp. 137,500,000	Rp. 245,900,000
1	1	9			Bantuan Kabupaten / Kota	Rp. 291,400,000	Rp. 320,000,000
					Jumlah Pendapatan	Rp.1,397,811,000	Rp.1,232,150,000
2					Belanja		
2	2				Belanja Langsung	Rp. 26,000,000	Rp. 34,000,000
2	2	2	1		Honor Tim / Panitia	Rp. 7,200,000	Rp. 7,000,000
2	2	2	2		Transportasi Peserta	Rp. 13,840,000	Rp. 15,000,000
2	2	1			Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat	Rp. 102,900,000	Rp. 93,500,000
2	2	1	1	2	Tunjangan kepala desa dan perangkat	Rp. 36,600,000	Rp. 30,000,000
2	2	1	1	3	Tambahan Penghasiln Perangkat Desa	Rp. 75,000,000	Rp. 68,000,000
2	2	1	1	4	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Rp. 53,000,000	Rp. 55,000,000
2	2	1	1	5	Tunjangan BPD	Rp. 75,800,000	Rp. 69,000,000
2	2	1	1	6	Operasional Perkantoran		
2	2	2			Belanja barang dan jasa		
2	2	2	2	1	Kunjungan kerja kades, sekdes, ketua BPD	Rp. 22,500,000	Rp. 15,090,000
2	2	2	2	2	Alat tulis kantor	Rp. 27,400,000	Rp. 21,370,000
2	2	2	2	3	Tambahan penghasilan P3N, LPMD imam, limnas desa	Rp. 62,100,000	Rp. 47,000,000
2	2	2	2	4	Kegiatan Asuransi Desa dan BPD	Rp. 18,489,000	Rp. 15,000,000
2	2	2	2	5	Perjalanan dinas	Rp. 48,640,000	Rp. 35,000,000
2	2	2	2	6	Rapat desa	Rp. 16,900,000	Rp. 17,000,000
2	2	2	2	7	Pemeliharaan kendaraan dinas	Rp. 7,000,000	Rp. 10,000,000
2	2	2	2	8	Penggandaan	Rp. 4,830,000	Rp. 5,000,000
2	2	2	2	9	Honor Limas	Rp. 10,200,000	Rp. 10,200,000
2	2	2	2	10	Keamanan dan Kebersihan kantor	Rp. 7,700,000	Rp. 7,700,000

2	2	2	2	11	Honor pelaksana	Rp. 2,085,000	Rp. 2,085,000
2	2	2	2	12	Pembuatan RKA / APBDes	Rp. 3,500,000	Rp. 3,500,000
2	2	2	2	13	Rekening PAM	Rp. 9,400,000	Rp. 10,000,000
2	2	2	2	14	Rekening Listrik	Rp. 12,000,000	Rp. 12,000,000
2	2	2	2	15	Pengukuran dan pemeriksaan Transaksi	Rp. 1,750,000	Rp. 1,750,000
2	2	2	2	16	Adinistrasi SPPH / SKT	Rp. 3,000,000	Rp. 3,000,000
2	2	2	2	17	Konsumsi kantor	Rp. 24,095,000	Rp. 14,095,000
2	2	2	2	18	Pelacakan / Perintisan dan pemetaan hutan desa	Rp. 15,300,000	Rp. 13,000,000
2	2	3	3		Belanja modal		
2	2	3	3	1	Baju dinas perangkat desa	Rp. 4,950,000	Rp. 2,500,000
2	2	3	3	2	Baju batik perangkat desa	Rp. 1,375,000	Rp. 800,000
2	2	3	3	3	papan kegiatan / tugas kepala desa	Rp. 600,000	Rp. 600,000
2	2	3	3	4	Papan rekapitulasi penduduk	Rp. 200,000	Rp. 200,000
2	2	3	3	5	Papan struktur linmas	Rp. 500,000	Rp. 500,000
2	2	3	3	6	Papan nama jalan / gang	Rp. 500,000	Rp. 350,000
2	2	3	4		Operasional BPD		
2	2	3	4		Belanja barang dan jasa	Rp. 171,080,000	Rp. 125,280,000
2	2	3	4	1	ATK	Rp. 3,580,000	Rp. 3,580,000
2	2	3	4	2	Perjalanan dinas	Rp. 7,500,000	Rp. 7,500,000
2	2	3	4	4	Rapat BPD	Rp. 1,580,000	Rp. 1,580,000
2	2	3	4	5	Penggandaan	Rp. 360,000	Rp. 360,000
2	2	3	4	6	Pakaian dinas	Rp. 4,050,000	Rp. 4,050,000
2	2	3	4	7	Laptop	Rp. 7,000,000	Rp. 7,000,000
2	2	3	4	8	Papan struktur BPD	Rp. 600,000	Rp. 600,000
2	2	3	4	9	Papan merk / Nama BPD	Rp. 1,500,000	Rp. 1,500,000
2	2	3	4	10	Operasional RT / RW	Rp. 9,040,000	Rp. 16,000,000
2	2	3	4	11	Belanja barang dan jasa		
2	2	3	4	13	Belanja Tidak Langsung	Rp. 131,854,350	Rp. 179,300,000
2	2	3	4	14	Konsumsi Rapat	Rp. 13,600,000	Rp. 15,000,000
2	2	4	5	1	Bidang pelaksanaan pembangunan desa		
2	2	4	5	3	Pengadaan batuan pengerasan jalan	Rp. 10,463,000	Rp. 4,500,000
2	2	4	5	4	Pembuatan jalan setapak	Rp. 59,865,000	Rp. 40,491,050
2	2	4	6	2	Belanja barang dan jasa		
2	2	4	6	3	Kunjungan kerja ketua pkk	Rp. 4,000,000	Rp. 12,450,000
2	2	4	6	4	Pekerjaan dinas ketua anggota	Rp. 2,100,000	Rp. 5,000,000
2	2	4	6	5	Rapat PKK	Rp. 900,000	Rp. 600,000
2	2	4	6	6	Penggandaan PKK	Rp. 847,000	Rp. 500,000
2	2	4	6	7	Mangkuk sop besar PKK	Rp. 1,600,000	Rp. 1,000,000
2	2	4	6	8	Lomba masak ibu PKK	Rp. 2,000,000	Rp. 1,000,000

2	2	4	6	9	Kebun toga PKK	Rp. 400,000	Rp. 500,000
2	2	4	6	10	Papan kegiatan PKK	Rp. 3,000,000	Rp. 1,000,000
2	2	4	6	11	Pengadaan kursi plastik		
2	2	4	6	12	Dispenser	Rp. 650,000	Rp. 400,000
2	2	4	6	13	Teko Listrik	Rp. 350,000	Rp. 350,000
2	2	4	6	14	Pakaian sanggar tari		
2	2	4	6	15	Pengadaan peralatan olahraga	Rp. 495,000	Rp. 500,000
2	2	4	6	16	Kegiatan HUT RI	Rp. 3,669,000	Rp. 2,000,000
2	2	4	6	17	Kegiatan gotong royong	Rp. 7,100,000	Rp. 2,000,000
2	2	4	6	18	Pemantapan lembaga adat	Rp. 920,000	Rp. 760,000
2	2	4	6	19	Pengadaan sarana prasarana perpustakaan	Rp. 8,970,000	Rp. 5,400,000
2	2	4	6	20	Pengadaan benih ikan		
2	2	4	6	21	mesin genset kantor	Rp. 4,000,000	Rp. 1,200,000
2	2	4	6	22	Hndycam	Rp. 4,000,000	Rp. 2,275,000
2	2	4	6	23	Kegiatan sosial perbaikan rimah tangga	Rp. 1,750,000	Rp. 1,750
2	2	4	6	24	Langganan koran	Rp. 2,520,000	Rp. 1,115,000
2	2	4	6	25	Kegiatan posyandu	Rp. 7,200,000	Rp. 7,200
2	2	4	7		Peningkatan Kapasitas kelompok perempuan		
2	2	4	7	1	Pembelian pakaian	Rp. 2,200,000	Rp. 1,700,000
2	2	4	7	2	Pembelian mesin jahit dan perlengkapan	Rp. 27,800,000	Rp. 8,000,000
2	2	4	7	3	Pengadaan mesin pengolahan makanan	Rp. 10,721,650	Rp. 3,250,000
2	2	5	8		Pembersihan steam		
2	2	5	8	1	Alat musik tradisional	Rp. 5,000,000	Rp. 1,000,000
2	2	5	8	3	Pengadaan mesin	Rp. 4,000,000	Rp. 2,500,000
2	2	5	8	4	Pengadaan mesin pinil	Rp. 2,000,000	Rp. 2,000,000
					Jumlah Belanja	Rp.1,225,619,000	Rp.1,079,490,000

Sumber : Sekretariat Desa Gunung Megang 2017

8. **Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)**

Tabel IV.X
Rincian Anggaran Realisasi Pendapatan Desa Gunung Megang
Tahun 2011 - 2015

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	
2011	Rp. 216.042.600	Rp. 180.412.600	83,50 %
2012	Rp. 297.330.000	Rp. 263.010.000	88,45 %
2013	Rp. 526.371.560	Rp. 384.664.000	73,07 %
2014	Rp. 822.870.000	Rp. 768.937.000	93,44 %
2015	Rp. 1.397.811.000	Rp. 1.232.150.000	88,14 %

Sumber : Sekretariat Desa Gunung Megang 2017

Tabel IV.X menunjukkan rincian anggaran realisasi pendapatan desa gunung megang selama 5 tahun, berdasarkan perkembangan pendapatan desa gunung megang terdapat persntasi yang mengalami kenaikan dibanding tahun lainnya seperti tahun 2014 sebesar 93,44 % sedangkan persentasi yang mengalami penurunan drastis diantara tahun lainnya terdapat pada tahun 2013 sebesar 73,07 %.

Tabel VI.XI
Rincian Anggaran Realisasi Belanja Desa Gunung Megang
Tahun 2011 - 2015

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2011	Rp. 189.274.000	Rp. 158.830.000	83,91 %
2012	Rp. 240.720.000	Rp. 178.130.000	73,99 %
2013	Rp. 425.115.000	Rp. 404.340.000	95,11 %
2014	Rp. 900.114.000	Rp. 890.311.000	98,91 %
2015	Rp. 1.225.619.000	Rp. 1.079.490.000	88,07 %

Sumber : Sekretariat Desa Gunung Megang 2017

Tabel IV.XI menunjukkan rincian anggaran realisasi belanja desa gunung megang selama 5 tahun, berdasarkan perkembangan belanja desa gunung megang terdapat persntasi yang mengalami kenaikan dibanding tahun lainnya seperti tahun 2014 sebesar 98,91 % sedangkan persentasi yang mengalami penurunan drastis diantara tahun lainnya terdapat pada tahun 2012 sebesar 73,99 %.

B. Pembahasan

1. Pengukuran Kinerja *Value For Money*

Value for money adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya ditinjau dari aspek keuangan saja tetapi menggunakan aspek non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu progam kerja sektor publik.

Faktor yang paling penting dalam pemerintah adalah pengukuran kinerja, dengan adanya pengukuran kinerja maka pemerintah bisa menilai keuangan pemerintah dengan cara menggunakan metode *value for money* yang dihitung menggunakan rasio ekonomis, efesien dan efektifitas.

a. Rasio Ekonomis

1) Perhitungan Rasio Ekonomis

Rasio ekonomis menggambarkan pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentasi tingkat pencapaiannya. Dimana arti dari ekonomis secara

sederhana adalah cara menggunakan sesuatu hal secara hati – hati dan bijak agar memperoleh hasil yang baik.

Tingkat ekonomis dihitung berdasarkan data dari laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa gunung megang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat ekonomis.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100 \%$$

Berikut ini perhitungan rasio ekonomis dalam mengelola anggaran pendapatan belanja desa gunung megang tahun 2011 - 2015.

a) Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{\text{Rp. } 158.830.000}{\text{Rp. } 189.274.000} \times 100 \% \\ &= 83,91 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2011 hasil perhitungan rasio ekonomis dari pelaksanaan anggaran belanja desa gunung megang sebesar 83,91% yang artinya cukup ekonomis karena telah mengikuti kriteria rasio ekonomis yang diperoleh sekitar 80% - 90%. Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang baik dalam melakukan pengelolaan anggaran belanja desa dimana jumlah anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp. 189.274.000 yang mana anggaran ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja

modal lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 158.830.000. Unsur Anggaran dan realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak adalah anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 71.055.000 sedangkan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 70.086.000.

b) Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{\text{Rp. } 178.130.000}{\text{Rp. } 240.720.000} \times 100 \% \\ &= 73,99 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2012 hasil perhitungan rasio ekonomis dari pelaksanaan anggaran belanja desa gunung megang sebesar 73,99% turun dari tahun sebelumnya yang artinya kurang ekonomis karena kriteria rasio ekonomis yang diperoleh sekitar 60 % - 80 %. Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang kurang baik dalam melakukan pengelolaan anggaran belanja desa dimana jumlah anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp. 240.720.000 yang mana anggaran ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 178.130.000.

Unsur Anggaran dan realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak adalah anggaran modal sebesar Rp. 94.700.000 sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp. 74.450.000.

c) Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{\text{Rp. } 404.340.000}{\text{Rp. } 425.115.000} \times 100 \% \\ &= 95,11 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2013 hasil perhitungan rasio ekonomi dari pelaksanaan anggaran belanja desa gunung megang sebesar 95,11% meningkat dari tahun sebelumnya yang artinya ekonomis karena telah mengikuti kriteria rasio ekonomis yang diperoleh sekitar 90% - 100 %. Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang baik dari sebelumnya dalam melakukan pengelolaan anggaran belanja desa dimana jumlah anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp. 425.115.000 yang mana anggaran ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 404.340.000.

Unsur Anggaran dan realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak adalah anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 182.415.000 sedangkan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 170.555.000

d) Tahun 2014

$$\begin{aligned}
 \text{Ekonomis} &= \frac{\text{Rp. } 890.311.000}{\text{Rp. } 900.114.000} \times 100 \% \\
 &= 98,91 \%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2014 hasil perhitungan rasio ekonomi dari pelaksanaan anggaran belanja desa gunung megang sebesar 98,91% meningkat dari tahun sebelumnya yang artinya ekonomis karena telah mengikuti kriteria rasio ekonomis yang diperoleh sekitar 90% - 100 %. Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang baik dari sebelumnya dalam melakukan pengelolaan anggaran belanja desa dimana jumlah anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp. 900.114.000 yang mana anggaran ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 890.311.000.

Unsur Anggaran dan realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak adalah anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 358.709.000 sedangkan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 433.810.000.

e) Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Ekonomis} &= \frac{\text{Rp. 1.079.490.000}}{\text{Rp. 1.225.619.000}} \times 100 \% \\ &= 88,07 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015 hasil perhitungan rasio ekonomi dari pelaksanaan anggaran belanja desa gunung megang sebesar 88,07% turun dari tahun sebelumnya yang artinya cukup ekonomis karena telah mengikuti kriteria rasio ekonomis yang diperoleh sekitar 80% - 90 %. Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam melakukan pengelolaan anggaran belanja desa dimana jumlah anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp. 1.225.619.000 yang mana anggaran ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 1.079.490.000

Unsur Anggaran dan realisasi belanja yang memberikan kontribusi paling banyak adalah anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 548.169.000 sedangkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp.501.040.000

2) Analisis Rasio Ekonomis

Pengukuran rasio ekonomis dihitung dengan menggunakan realisasi dan anggaran pendapatan pemerintahan desa gunung megang. Berikut ini rincian hasil dari perhitungan rasio ekonomi selama 5 tahun.

Tabel IV.XII

Hasil Rasio Ekonomis Desa Gunung Megang Tahun 2011 - 2015

Tahun	Rasio Ekonomis	Kriteria Ekonomis
2011	83,91 %	Cukup Ekonomis
2012	73,99 %	Kurang Ekonomis
2013	95,11 %	Ekonomis
2014	98,91 %	Ekonomis
2015	88,07 %	Cukup Ekonomis

Sumber : Penulis 2017

Tabel IV.XII menunjukkan bahwa program kerja pemerintahan desa gunung megang dalam 4 tahun secara keseluruhan ekonomis karena telah memenuhi kriteria dan rasio ekonomi yang menunjukkan standar rasio VFM dimana biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional selisihnya tidak jauh berbeda dengan biaya yang ditetapkan hal ini menunjukkan Pemerintahan desa gunung megang telah dapat mengelola kegiatannya dengan baik. Dimana dengan adanya pengelolaan biaya secara cermat dan tidak ada pemborosan dalam pengelolaan sumber daya maka akan mempengaruhi kinerja secara ekonomi pemerintah yang berarti semakin besar anggaran yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi

biaya yang dikeluarkan maka rasio ekonominya semakin tinggi. Hanya saja terdapat salah satu yang belum bisa dikatakan ekonomis yaitu terdapat di tahun 2012 karena dalam melaksanakan program kerjanya dengan anggaran belanja sebesar Rp.240.720.000 dimana dalam pelaksanaannya hanya menghambiskan dana Rp. 178.130.000. Hasil perhitungan rasio ekonomisnya sebesar 73,99 % yang menunjukkan hasil kurang dari 100 % yang berarti tidak ekonomis dalam standar *value for money* hal ini terjadi karena adanya anggaran biaya yang berada lebih besar daripada realisasi belanja sehingga menimbulkan kelebihan anggaran belanja yang belum sepenuhnya terpakai dalam memanfaatkan anggaran belanja.

Berdasarkan keadaan rasio ekonomis di pemerintah desa gunung diatas, maka pemerintah desa gunung megang harus terus berupaya dalam mengelola anggaran untuk menetapkan setiap perencanaan. Adapun kegiatan dan program desa gunung megang agar dana yang telah diberikan bisa dimanfaatkan secara maksimal selain itu pemerintahan desa gunung megang harus membuat suatu target atau pencapaian waktu kerja yang lebih baik lagi. Dari segi pembangunan, pemberdayaan desa sebaiknya pemerintah daerah khusus desa gunung megang untuk membuat program – program desa yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa agar dapat sejahtera.

b. Rasio Efisiensi

1) Perhitungan Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. dimana dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya.

Tingkat efisiensi dihitung berdasarkan data dari laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa gunung megang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya yang dikeluarkan}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100 \%$$

Berikut ini perhitungan rasio efisiensi dalam mengelola anggaran pendapatan belanja desa gunung megang tahun 2011 - 2015.

a) Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp. } 158.830.000}{\text{Rp. } 180.412.600} \times 100 \% \\ &= 88,03\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2011 hasil perhitungan rasio efisiensi dari pelaksanaan anggaran belanja pendapatan desa gunung megang sebesar 88,03% yang artinya cukup efisiensi karena telah mengikuti

kriteria rasio efisiensi sebesar 80% - 90%. Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa dimana jumlah anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp. 158.830.000 yang mana anggaran ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima adalah sebesar Rp. 180.412.600 yang terdiri dari pendapatan bantuan keuangan pemerintah provinsi kota, hasil usaha desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Unsur realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak adalah pendapatan dari bantuan keuangan pemerintah sebesar Rp. 70.000.000 sedangkan realisasi belanja meliputi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 70.086.000.

b) Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp. } 178.130.000}{\text{Rp. } 263.010.000} \times 100 \% \\ &= 67,72\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2012 hasil perhitungan rasio efisiensi dari pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa gunung megang sebesar 67,72% yang artinya efisiensi karena telah mengikuti kriteria rasio efisiensi sebesar 60% - 80%. Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang baik dari tahun sebelumnya dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa, semakin kecil efisiensi berarti kinerja efisiensinya semakin baik. dimana

jumlah anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp. 178.130.000 yang mana anggaran ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima adalah sebesar Rp.263.010.000 yang terdiri dari pendapatan bantuan keuangan pemerintah provinsi kota, hasil usaha desa, alokasi dana desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Unsur realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak adalah pendapatan dari alokasi dana desa sebesar Rp. 150.000.000 sedangkan realisasi belanja meliputi belanja modal sebesar Rp. 74.450.000.

c) Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp. } 404.340.000}{\text{Rp. } 384.664.000} \times 100 \% \\ &= 105,11\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2013 hasil perhitungan rasio efisiensi dari pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa gunung megang sebesar 105,11% yang artinya tidak efisiensi karena kriteria rasio efisiensi yang diperoleh sebesar 100 % keatas. Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang tidak baik dari tahun sebelumnya dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa, semakin besar tingkat efisiensi berarti kinerja efesiensinya semakin tidak baik. dimana jumlah anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp. 404.340.000 yang mana anggaran ini

terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima adalah sebesar Rp. 384.664.000 yang terdiri dari pendapatan bantuan keuangan pemerintah provinsi kota, hasil usaha desa, alokasi dana desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Unsur realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak adalah pendapatan dari alokasi dana desa sebesar Rp. 186,104,000 sedangkan realisasi belanja meliputi belanja barang jasa sebesar Rp. 170.555.000

d) Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp. } 890.311.000}{\text{Rp. } 768.937.000} \times 100 \% \\ &= 115,78\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2014 hasil perhitungan rasio efisiensi dari pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa gunung megang sebesar 115,78 % yang artinya tidak efisiensi karena kriteria rasio efisiensi melebihi 100%. Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang tidak baik dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa, semakin besar tingkat efisiensi berarti kinerja efisiensinya semakin tidak baik. dimana jumlah anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp. 890.311.000 yang mana anggaran ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima

adalah sebesar Rp. 768.937.000 yang terdiri dari pendapatan bantuan keuangan pemerintah provinsi kota, hasil usaha desa, alokasi dana desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Unsur realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak adalah pendapatan dari alokasi dana desa sebesar Rp. 301,637,000 sedangkan realisasi belanja meliputi belanja barang jasa sebesar Rp. 433.810.000.

e) Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp. 1.079.490.000}}{\text{Rp. 890.311.000}} \times 100 \% \\ &= 121,24\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015 hasil perhitungan rasio efisiensi dari pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa gunung megang sebesar 121,24 % yang artinya tidak efisiensi karena kriteria rasio efisiensi yang diperoleh diatas 100%. Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang tidak baik dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa, semakin besar tingkat efisiensi maka kinerja efisiensinya semakin tidak baik. Dimana jumlah anggaran belanja yang terealisasi sebesar Rp. 1.079.490.000 yang mana anggaran ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal sedangkan realisasi anggaran pendapatan yang diterima adalah sebesar Rp. 890.311.000 yang terdiri dari pendapatan bantuan keuangan

pemerintah provinsi kota, hasil usaha desa, alokasi dana desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Unsur realisasi pendapatan yang memberikan kontribusi paling banyak adalah pendapatan dari alokasi dana desa sebesar Rp.350,000,000 sedangkan realisasi belanja meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 501.040.000

2) Analisis Rasio Efisiensi

Pengukuran rasio efisiensi dihitung dengan menggunakan realisasi biaya yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaan pemerintahan desa gunung megang. Berikut ini rincian hasil dari perhitungan rasio efisiensi selama 5 tahun.

Tabel IV.XIII

Hasil Rasio Efisiensi Desa Gunung Megang Tahun 2011 - 2015

Tahun	Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
2011	88,03 %	Cukup Efisien
2012	67,72 %	Efisien
2013	05,11 %	Tidak Efisien
2014	115,78 %	Tidak Efisien
2015	121,24 %	Tidak Efisien

Sumber : Penulis 2017

Tabel IV.XIII menunjukkan Rasio efisiensi dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan desa gunung megang dalam tahun 2011 dan 2012 tergolong efisien karena telah memenuhi standar rasio VFM dibawah 100

% dimana jumlah anggaran belanja tidak melebihi jumlah pendapatan yang diperoleh sehingga instansi dapat berhemat dalam menggunakan anggaran yang telah ditetapkan sehingga diharapkan pemerintah desa gunung megang lebih memperhatikan belanja desa yang seharusnya tidak melampaui pendapatan desa agar penggunaan keuangan desa dapat dipergunakan lebih efisien. Sedangkan untuk tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 belum bisa dikatakan efisien karena menunjukkan hasil lebih dari 100 % yang berarti tidak efisien dalam standar rasio VFM hal ini terjadi karena adanya pemborosan dana anggaran belanja yang melebihi pendapatan sehingga menunjukkan penggunaan anggaran belanja tidak tepat sasaran dalam memaksimalkan program kerja.

Dari keadaan efisiensi anggaran realisasi pendapatan belanja desa gunung megang perlu diperhatikan atau diawasi setiap anggaran belanja yang dikeluarkan sehingga bisa menghasilkan belanja barang jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat dan brdaya guna. Aparat desa gunung megang harus bisa memberikan hasil kerja nyata yang telah dicapai dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya, agar tercipta masyarakat yang sejahtera.

c. Rasio Efektifitas

1) Perhitungan Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dengan target yang ditetapkan

dengan kata lain apabila pemerintah berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa pemerintah tersebut telah berjalan efektif dan semakin tinggi rasio efektifitas maka semakin baik kinerja pemerintah desa Gunung Megang.

Tingkat efektifitas dihitung berdasarkan data dari laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa gunung megang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektifitas.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

Berikut ini perhitungan rasio efektifitas dalam mengelola anggaran pendapatan belanja desa gunung megang tahun 2011 - 2015.

a) Tahun 2011

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{\text{Rp. 180.412.600}}{\text{Rp. 216.042.000}} \times 100 \% \\ &= 83,50 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2011 hasil perhitungan rasio efektifitas dari pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa gunung megang sebesar 83,50 % yang artinya cukup efektif karena kriteria rasio efektifitas yang diperoleh sebesar 80% - 90 %. Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa, semakin

besar tingkat efektifitas maka kinerja efektifitas pemerintah semakin baik. Dimana jumlah anggaran pendapatan yang terealisasi sebesar Rp.180.412.600 sedangkan anggaran pendapatan yang diterima adalah sebesar Rp.216.042.000 yang terdiri dari pendapatan bantuan keuangan pemerintah provinsi kota, hasil usaha desa, alokasi dana desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

b) Tahun 2012

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{\text{Rp. 263.010.000}}{\text{Rp. 297.330.000}} \times 100 \% \\ &= 88,45 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2012 hasil perhitungan rasio efektifitas dari pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa gunung megang sebesar 88,45 % yang artinya cukup efektif karena kriteria rasio efektifitas yang diperoleh sebesar 80% - 90 %. Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa, semakin besar tingkat efektifitas maka kinerja efektifitas pemerintah semakin baik. Dimana jumlah anggaran pendapatan yang terealisasi sebesar Rp.263.010.000 sedangkan anggaran pendapatan yang diterima adalah sebesar Rp.297.330.000 yang terdiri dari pendapatan bantuan keuangan pemerintah provinsi kota, hasil usaha desa, alokasi dana desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

c) Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{\text{Rp. 384.664.000}}{\text{Rp. 526.371.500}} \times 100 \% \\ &= 73,07 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2013 hasil perhitungan rasio efektifitas dari pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa gunung megang sebesar 73,07 % yang artinya kurang efektif dari tahun sebelumnya karena kriteria rasio efektifitas yang diperoleh sebesar 60% - 80% . Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang kurang baik dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa, semakin besar tingkat efektifitas maka kinerja efektifitas pemerintah semakin baik. Dimana jumlah anggaran pendapatan yang terealisasi sebesar Rp. 384.664.000 sedangkan anggaran pendapatan yang diterima adalah sebesar Rp.526.371.500 yang terdiri dari pendapatan bantuan keuangan pemerintah provinsi kota, hasil usaha desa, alokasi dana desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

d) Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{\text{Rp. 768.937.000}}{\text{Rp. 822.870.000}} \times 100 \% \\ &= 93,99 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2014 hasil perhitungan rasio efektifitas dari pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa gunung megang

sebesar 93,99 % yang artinya efektif dari tahun sebelumnya karena kriteria rasio efektifitas yang diperoleh sebesar 90% - 100%. Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang baik dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa, semakin besar tingkat efektifitas maka kinerja efektifitas pemerintah semakin baik. Dimana jumlah anggaran pendapatan yang terealisasi sebesar Rp.768.937.000 sedangkan anggaran pendapatan yang diterima adalah sebesar Rp.822.870.000 yang terdiri dari pendapatan bantuan keuangan pemerintah provinsi kota, hasil usaha desa, alokasi dana desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

e) Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{\text{Rp. 1.232.150.000}}{\text{Rp. 1.397.811.000}} \times 100 \% \\ &= 88,14 \% \end{aligned}$$

Pada tahun 2015 hasil perhitungan rasio efektifitas dari pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa gunung megang sebesar 88,14 % yang artinya cukup efektif karena kriteria rasio efektifitas yang diperoleh sebesar 80% - 90%. Hal ini berarti kinerja desa gunung megang menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam melakukan pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa, semakin besar tingkat efektifitas maka kinerja efektifitas pemerintah semakin baik. Dimana jumlah anggaran pendapatan yang terealisasi sebesar Rp.1.232.150.000 sedangkan anggaran pendapatan yang diterima

adalah sebesar Rp.1.397.811.000, yang terdiri dari pendapatan bantuan keuangan pemerintah provinsi kota, hasil usaha desa, alokasi dana desa dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

2) Analisis Rasio Efektifitas

Pengukuran rasio efektifitas dihitung dengan menggunakan realisasi pendapatan anggaran pendapatan pemerintahan desa gunung megang. Berikut ini rincian hasil dari perhitungan rasio efektifitas selama 5 tahun.

Tabel IV.XIV

Hasil Rasio Efektifitas Desa Gunung Megang Tahun 2011 - 2015

Tahun	Rasio Efektifitas	Kriteria Efektifitas
2011	83,50 %	Cukup Efektifitas
2012	88,45 %	Cukup Efektifitas
2013	73,07 %	Efektifitas
2014	93,99 %	Tidak Efektifitas
2015	88,14 %	Cukup Efektifitas

Sumber : Penulis 2017

Tabel IV.XIV menunjukkan hasil rasio efektifitas selama 5 tahun terbilang cukup efektif dalam menilai kinerja pemerintahan desa gunung megang sudah memenuhi standar hal ini disebabkan karena selisih antara realisasi anggaran pendapatan dan target anggaran pendapatan tidak jauh berbeda. Selain itu pemerintahan desa gunung megang cukup berhasil dalam menjalankan kinerjanya sehingga dapat memberikan pelayanan kepada

masyarakat lebih baik lagi. Untuk tetap mempertahankan keadaan efektifitas tersebut pemerintah desa gunung megang harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada dan harus terus mencari alternative – alternatof yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangannya agar progam dan kegiatan bisa dijalankan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini memerlukan usaha dari aparat dalam pelaksanaan kemajuan pemerintahan desa gunung megang.

Kinerja pemerintahan desa gunung megang diatakan baik dari segi efektifitas bukan hanya ditujukan pada angka penurunan rasio efektifitas akan tetapi dapat dilihat juga dari segi pencapaian progam yang telah dilaksanakan,progam pembangunan desa dimaksudkan agar segala sesuatu yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas aparat desa harus dapat diwujudkan dalam kehidupan warga sehingga wujud dari pelaksanaan aparat desa berupa progam – progam kegiatan dapat dirasakan manfaatnya.

Berikut ini rincian pencapaian progam yang dilaksanakan desa gunung megang yang bersumber dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa gunung megang tahun 2011 - 2015.

Tabel IV.XV
Rincian Progam dan Kegiatan yang dijalankan Desa Gunung Megang
dari tahun 2011 sampai dengan 2015

Progam dan kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
Pembangunan Jalan Produksi Rabat Beton	✓	✓	✓	✓	✓
Peningkatan dan pelebaran seluruh badan jalan poros / Jalan lingkaran desa	✓	✓	✓	✓	✓
Lanjutan Peningkatan sebagian ruas Jalan yang rawan terputus .	✓	✓	✓		
Pembangunan Siring Induk	✓	✓	✓	✓	✓

Pembangunan Siring Anak (Kiri kanan jalan Poros / Lingkar Desa)	✓	✓	✓	✓	✓
Lanjutan Pembangunan Dam Penahan lonngsor bibir Sungai lematang	✓	✓	✓	✓	✓
Perbaikan Gedung ,Pagar Kantor Desa serta Pembangunan Lapangan Parkir Kantor Desa	✓	✓			
Pembangunan POS KAMLING Permanen	✓	✓			
Pembukaan lahan Perkebunan milik Desa	✓	✓	✓	✓	✓
Masih perlu adanya Pembangunan jalan setapak di area Pemukiman warga /antar Dusun.	✓	✓	✓	✓	✓
Lanjutan Pembangunan Pagar TPU	✓	✓		✓	
EKONOMI					
Pertanian					
Pembinaan dan Bimbingan kelompok - kelompok Pertanian, Perkebunan dan Peternakan secara berkala dan berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓
Pengadaan koperasi pertanian desa	✓	✓	✓	✓	
Peternakan / Perikanan					
Pengadaan tambak perikanan	✓	✓	✓	✓	✓
Pembentukan kelompok usaha peternakan sapi	✓	✓	✓		
Perdagangan					
Koperasi desa	✓	✓			
Pengadaan Lampu Jalan	✓	✓	✓		
SOSIAL BUDAYA					
Pendidikan					
Pengadaan TK satu atap SDN 2 Gn Megang.	✓	✓			
Tenaga Pengajar TK TPA, TPQ	✓	✓			
Olah Raga					
Bantuan pembuatan lapangan bola Volly	✓	✓	✓	✓	✓
Kesehatan					
Pengadaan sistem teknis pengelolaan Air Bersih	✓	✓	✓	✓	✓

Pembangunan MCK Umum	✓	✓	✓	✓	
Pemerintahan					
Pelatihan pengurus LPMD	✓	✓	✓	✓	✓
Pengadaan bintek Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber : Penulis 2017

Berdasarkan tabel diatas progam pembangunan desa gunung megang yang tersusun sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan yang ada disekitar desa, sehingga diharapkan progam pembangunan yang dilaksanakan telah benar – benar berjalan efektif dalam menanggulangi permasalahan dimasyarakat seperti pendidikan,kesehatan dll. Dimana pembangunan progam diatas bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta tersedianya sarana dan prasarana fasilitaas umum untuk menunjang segala kebutuhan masyarakat yang masih kurang untuk membantu masyarakat desa. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan pada level desa, dalam melaksanakan progam berupa pembangunan fisik merupakan sesuatu yang harus direalisasikan oleh desa gunung megang namun kenyataannya masih terdapat masalah yang terkendala serta pembangunan progam yang belum sepenuhnya terlaksana.

Berikut ini Rincian progam yang masih terkendala dan belum dilaksanakan secara keseluruhan oleh desa gunung megang.

Tabel IV.XVI
Rincian Program yang Belum Dilaksanakan Desa Gunung Megang

No	Pengembangan Wilayah
1.1	Pekerjaan Umum
1.1.1	Di dusun 2 dan 3 sering banjir
1.1.2	Tanah dipinggir sungai lematang terbis
1.1.3	Tidak ada jalan lingkar kedesa sidomulyo
1.1.4	Dusun 1 – Dusun 4 tidak ada pembangunan MCK umum
1.1.5	Perbaikan jembatan gantung rusak
1.1.6	Musim hujan air tergenang terjadi banjir
1.1.7	Pembuatan jalan antar desa ke desa sidomulyo
2.1.	Bidang Ekonomi
2.1.1	Sektor Pertanian
2.1.1.1	Sawah Banjir
2.1.1.2	Tidak ada perkebunan desa
2.1.2	Sektor Perternakan
2.1.2.1	Tidak ada tambak
2.1.2.2	Tidak ada Kelompok usaha tani
3.1.	Bidang Olahraga
3.1.1.	Tidak ada lapangan bola Volli
4.1	Sektor Kesehatan
4.1.1	Banyak terjangkit penyakit kulit
4.1.2	Ibu-ibu peserta Kb kesulitan mendapatkan alat kontrasepsi

Sumber : Penulis 2017

Berdasarkan tabel diatas, masih terdapat program yang masih terkendala dan belum dilaksanakan desa gunung megang ini disebabkan karena anggaran pendapatan belanja desa mengalami surplus yang berarti penerimaan melebihi jumlah anggaran belanja sehingga mengakibatkan kelebihan anggaran kondisi ini tentu harus menjadi perhatian karena secara implisit desa gunung megang hanya menganggarkan sebagian kecil APBDes sehingga terjadi keterbatasan program dan kegiatan desa. Berdasarkan penelitian dilapangan dalam proses pelaksanaannya, pembangunan dan anggaran kurang transparan sehingga warga desa tidak mengetahui program apa saja yang dijalankan oleh aparat desa serta

anggaran yang berkaitan dengan program pembangunan tersebut. selain itu dalam proses melaksanakan program desa gunung megang sering mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan pemerintah dalam mencapai program yang dilaksanakan ini dikarenakan sumber daya yang dimiliki desa gunung megang masih sangat rendah dan belum memaksimalkan sosialisasinya.

d. Outcome

Outcome adalah suatu keluaran yang langsung digunakan atau dampak yang ditimbulkan dari setiap kegiatan nyata dalam suatu program.

Berikut ini rincian kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan di desa gunung megang.

Program / Kegiatan	Terlaksana	Belum Terlaksana
Pembangunan Jalan Besi Rabat Beton	✓	-
Dusun 1 – Dusun 4 Pembangunan MCK umum	-	✓
Pembangunan Siring induk	✓	-
Perbaikan Jembatan Gantung Rusak	-	✓
Pembangunan Pos Kamling Permanen	✓	-
Musim Hujan air tergenang terjadi banjir	-	✓
Pembuatan Jalan antar Desa ke Desa Sidomulyo	-	✓

Sumber kantor pemerintahan desa gunung megang luar 2017

Program yang belum dilaksanakan desa gunung megang diakibatkan oleh desa yang hanya mendanai sebagian kecil APBDes nya dan sering mengalami

keterlambatan, dalam mencapai target waktu pembangunan yang ditentukan pemerintah daerah sehingga menyebabkan program belum terealisasi secara penuh. Oleh sebab itu sebaiknya aparat desa harus selalu memperhatikan dan harus cermat mengelola anggaran, agar setiap anggaran yang diberikan dapat langsung direalisasikan sesuai kebutuhan dan masalah yang terjadi di desa. Sehingga dampak yang dilakukan dari aparat desa dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat desa. Dimana dampak tersebut dapat mempermudah hidup masyarakat, memacu masyarakat desa untuk membangun sarana & prasarana desa yang dibutuhkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pembangunan fisik desa berupa perbaikan jalan yang berdampak pada kemudahan sarana jalan yang membuat masyarakat lebih semakin mudah dan cepat sampai tujuan.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi pemerintah dalam melakukan kemudahan kepada masyarakat untuk menggunakan hak dan kewajibannya, sehingga setiap penyelenggaraan pelayanan yang diberikan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dan masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan asalkan pemerintah mau memperhatikan kualitas pelayanan, biaya dan mutu pelayanan yang lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dan observasi yang dilakukan, pemerintahan desa gunung megang harus mampu memberikan pelayanan publik yang memadai bagi warga desa, karena pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari aparat desa. Untuk itu diperlukan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan publik baik itu berupa peningkatan pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administrasi.

Berikut ini pelayanan publik desa gunung megang yang diurai secara satu persatu sebagai berikut :

a. Pelayanan Barang Publik

Pelayanan barang publik merupakan jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyimpanannya kepada masyarakat dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan ini menghasilkan produk akhir yang berwujud benda (berwujud fisik) yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi masyarakat. Secara sederhana pelayanan publik merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, desa gunung megang memberikan pelayanan barang kepada warga desa berupa pengadaan listrik dari hasil pengolahan PT (Persero) PLN, pengadaan air bersih dari hasil pengelolaan perusahaan daerah minuman PDAM, kebijakan pengamanan cadangan pangan melalui pengamanan harga pokok kepada golongan masyarakat tertentu, kebijakan pengadaan tabung gas tiga kilogram untuk

kelompok masyarakat tertentu dalam rangka konversi minyak tanah pindah kegas dan lain-lain.

Dari analisis yang dilakukan dan keadaan yang terjadi di desa gunung megang, sejauh ini pengadaan yang diberikan pemerintah kepada warga desa gunung megang sudah berjalan optimal hal ini terlihat dari pengadaan barang yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warga desa sehingga warga desa merasa tercukupi dan merasa puas dengan barang dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

b. Pelayanan Jasa Publik

Pelayanan jasa publik adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyediaan jasa publik ini bersumber dari instansi pemerintah yang sebagian dan seluruhnya dari anggaran pendapatan belanja desa.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, desa gunung megang memberikan pelayanan jasa publik berupa :

1) Bidang kesehatan

Pelayanan jasa dibidang kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, guna mencegah dan menyembuhkan penyakit masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah adalah kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Ada beberapa kegiatan yang diberikan oleh layanan puskesmas desa gunung megang yaitu penyuluhan kesehatan masyarakat, keluarga berencana ,perawatan kesehatan baik itu, gigi, mulut dan mata, kesehatan usia lanjut dan lain – lain.

Dari analisis yang dilakukan pelayanannya masih kurang optimal karena ibu – ibu masih kesulitan mendapatkan alat kontrasepsi dan disaat banjir melanda warga mudah sekali dan banyak terjangkit penyakit kulit.

Agar pelayanan kesehatan desa gunung megang lebih baik lagi maka perlu melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasaranan puskesmas demi terpenuhnya kebutuhan masyarakat dan mengatasi permasalahan kesehatan warga apa yang dibutuhkan segera dipenuhi. Selain itu perlu adanya penyuluhan untuk memberitahu bagaimana pencegahan dan antisipasi penyakit dan langkah menjaga kesehatan. Sehingga warga bisa lebih memperhatikan kesehatannya, jadi peran puskesmas bukan saja untuk mengobati masyarakat tetapi juga bisa berperan untuk penyuluhan informasi kesehatan kepada masyarakat. Karena mencegah penyakit lebih baik daripada mengobatinya.

2) Bidang pendidikan

Tujuan pembangunan dari segi pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas manusia serta menguasai ilmu pengetahuan,teknologi dan seni demi mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Dari analisis yang dilakukan, desa gunung megang memberikan pelayanan pendidikan dengan cara mengadakan TK dan SD N 2 serta tenaga pengajar TK,TPA,TPQ dll. Sejauh ini pendidikan yang diberikan desa gunung megang sudah baik hanya saja perlu ditingkakan lagi dalam pembelajaran, penambahan materi sekolah dan pemahaman anak tentang pentingnya pendidikan mereka sehingga anak – anak desa mempunyai gambaran dan merasakan manfaat apa saja yang diperoleh disekolah. Selain itu khususnya orang tua anak perlu memantau, mengawasi dan mengarahkan baik dari segi perkembangan pendidikan,ilmu, sikap dll agar anak – anak memiliki bekal secara dini untuk menghadapi lingkungan disekitar.

3) Bidang keamanan

Masyarakat merupakan pelaksana pembangunan, tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka pembangunan tidak akan berhasil demikian pula dengan terciptanya dan tetap terjaga keamanan masyarakat harus didukung dan diciptakan dari masyarakat itu sendiri.

Untuk menjaga keamanan dilingkungan maka pemerintah memberikan sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang merupakan sistem keamanan yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat untuk mencegah dan menangkal gangguan dari kriminalitas.

Dari analisis yang dilakukan, desa gunung megang telah mengikuti prosedur sistem keamanan pemerintah berupa pembangunan siskamling yang dilakukan dengan patroli atau keliling – keliling baik itu dengan jalan

kaki ataupun dengan menggunakan motor disekitaran desa sehingga keadaan desa gunung megang menjadi lebih aman dan kondusif. Untuk itu hendaknya warga desa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan desa dengan bergantian ronda atau patroli desa.

c. Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dari hasil observasi yang dilakukan, desa gunung megang memberikan pelayanan publik berupa :

1) Bidang surat menyurat

Pelayanan administrasi berupa surat menyurat ini dilakukan oleh sekretaris desa, ada beberapa kegiatan surat menyurat yang dilakukan didesa gunung megang yaitu surat keterangan nikah, surat keterangan usaha, surat keterangan pindah, surat keterangan E-KTP, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan akte kelahiran, surat kartu keluarga dan lain – lain.

Dari analisis yang dilakukan desa gunung megang masih terdapat kesalahan dalam segi penerapan kaidah bahasa indonesia dan penulisan dengan ukuran kualitas dan kuantitas tertentu, akan tetapi hal ini dianggap menjadi hal yang biasa karena menurut aparat desa, hanya berpedoman pada petunjuk pelaksana yang ada jadi bukan menjadi masalah yang besar. Selain itu pengurusan surat menyurat terkadang tidak tepat waktu dengan yang disepakati sehingga urusannya menjadi berbelit – belit yang mengakibatkan

masyarakat merasa tidak puas dan menjadi menggerutu atau berkomentar negatif

Untuk itu diperlukan evaluasi dalam meningkatkan kembali pelayanan dan kinerja aparat desa yaitu dengan memberikan pelatihan mengenai penulisan yang baik dan benar dan setiap pelaksanaan administrasi harus sesuai dengan kualitas dan keahliannya. Untuk mendukung sistem pelayanan, desa gunung megang harus memberikan kejelasan informasi penyebab dari keterlambatan dokumen dan menjelaskan secara transparan proses dan prosedurnya agar masyarakat mudah mengerti dan memahami sehingga hubungan antara aparat desa dan warga menjadi lebih baik lagi dari segi komunikasi.

2) Bidang keagraria

Dalam bidang agrari merupakan hal - hal yang berkaitan dengan pembagian, peruntukan dan pemilikan lahan. Yang menjadi dasar alat pokok dalam agrari adalah ilmu administrasi dan peraturan hukum.

Dari analisis yang dilakukan kegiatan dibidang agrari desa gunung megang meliputi pendaftaran dan pendataan jual beli tanah, pengaturan yang menjadi hak milik, pengaturan yang mengenai tanah kawasan milik daerah, dan pendataan hak tanah dan sebagainya.

Secara keseluruhan kegiatan administrasi agrari desa gunung megang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku dan peraturan daerah yang ada.

Sedangkan aspek non keuangan meliputi pelayanan publik yang terjadi di desa gunung megang. Dimana pelayanan publik ini terdiri dari pelayanan barang publik berupa pengadaan barang yang diberikan oleh pemerintah, yang telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warga, pelayanan jasa publik dari segi kesehatan, yang masih terdapat kendala karena ibu – ibu masih kesulitan mendapatkan alat kontrasepsi, dari segi pendidikan dan keamanan, desa gunung megang sudah berjalan optimal karena aparat desa telah mengikuti setiap sistem yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian Pelayanan administrasi berupa surat menyurat yang masih terdapat kendala dalam ketidaktepatan waktu dalam pengurusan surat atau dokumen yang dibutuhkan warga sehingga pengurusannya menjadi berbelit – belit dan memakan waktu yang lama.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Aparat desa diharapkan dapat lebih memperhatikan penggunaan anggaran belanja sehingga anggaran tersebut dapat digunakan secara efisien dan penggunaannya lebih tepat dalam menjalankan progam kegiatannya.

2. Aparat desa juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publiknya sehingga dengan sumber daya yang mendukung diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pelayanan.
3. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya aparat desa maka memerlukan adanya pelatihan dan penyuluhan mengenai tugas berupa pelayanan publik yang diberikan.
4. Kualitas atau pelayanan harus diperbaiki dan disamaratakan
5. Pemerintah harus ikut serta dalam mengawasi setiap pelayanan yang diberikan aparat desa jika terdapat kesalahan harus diberikan hukuman yang tegas
6. Agar pelayanan publik lebih meningkat maka pemerintah perlu melakukan survei terhadap warganya dan mencari tahu permasalahan apa saja yang terjadi di desa, apa yang diinginkan dan dibutuhkan warga serta sarana prasarana apa saja yang menjadi penunjang kemajuan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2008). **Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. (2013) **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta : Salemba Empat
- Deddi nordiawan. (2009). **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). **Akuntansi Sektor Publik edisi 2**. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Fakultas ekonomi dan bisnis UMP (2017). **Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Dan Skripsi Progam Strata I. Palembang**: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP.
- I Gusti Agung Rai. (2008). **Audit Kinerja Pada Sektor Publik**. Jakarta: Salemba Empat
- Isni (2015). **Analisis Kinerja Keuangan dengan pendekatan *value for money* Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi**. (Online), Vol.15 No.1 .
[http:// Jurnal.umsu.ac.id/index/akuntan/article/download/428.Pdf](http://Jurnal.umsu.ac.id/index/akuntan/article/download/428.Pdf).
- Umi Yuniarti (2015). **Analisis Efisiensi dan efektifitas anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)**. (Online)
http://repository.upy.ac.id/334/1/33EK5_UmiYuniarti.Pdf.
- Undang – Undang Republik Indonesia Pasal 1 No. 25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik.**
- Mahmudi. (2007). **Manajemen Kinerja Sektor Publik**. Yogyakarta : Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Prof.Dr.Mardiasmo.(2002).**Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Ridwan dan Sudrajat. 2009. **Hukum administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik**. Bandung: Nuansa.
- Siti Khairani (2013). **Analisis Value For Money dan Akuntabilitas dalam**

meningkatkan Pelayanan Publik Pada PDAM Tirta Musi Palembang.
(Online)

<http://eprints.mdp.ac.id/1146/1JurnalMDP.Pdf>

V.Wiratna Sujarweni. (2015). **Akuntansi Desa**. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press

V.Wiratna Sujarweni. (2014) **Metodologi Penelitian**.Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Press

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

DITAS
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/II / 2014 (B)
 Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/II / 2014 (B)
 Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred /S/XII / 2015 (B)
 Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred /S/III / 2015 (B)

Email : febumptg@umjalembang.ac.id
 Jalan Jendral Sudirman No. 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Februari 2017
 Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
 Nama : Diana Sari
 Nim : 222012300
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA *VALUE FOR MONEY* DALAM MENGELOLAH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAHAN DESA GUNUNG MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM

**TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
 PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
 UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Nina Sabrina, S.E, M.Si	Pembimbing	17/3 - 2017	
Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	17-3-2017	
Lis Djuniar, S.E, M.Si	Penguji I	13-3-2017	
Nina Sabrina, S.E, M.Si	Penguji II	15/3 - 2017	

Palembang, Maret 2017
 Dekan
 u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E, M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPS

MAHASISWA :	Diana Sari	PEMBIMBING :	
NPM :	22 2012 300	KETUA :	Nina Sabrina, S.E, M.Si
PROGRAM STUDI :	Akuntansi	ANGGOTA :	
JUDUL SKRIPSI :	Analisis Pengukuran Kinerja <i>Value For Money</i> Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Desa Guna Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang		

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	30/1 - 2017	BAB I, II, III			Acc BAB I, II, III
2.					
3.	2/2 - 2017	BAB IV			Perbaikan.
4.					
5.	3/2 - 2017	BAB IV			Perbaikan.
6.					
7.	6/2 - 2017	BAB IV			Perbaikan
8.					
9.	7/2 - 2017	BAB IV, V			Acc revisi dan kompleksitas dll.
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : 07/02/2017
a.n Dekan
Program Studi

Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA





**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN GUNUNG MEGANG
DESA GUNUNG MEGANG LUAR**

Muara Enim
082380693818-

Jalan Lokomotif Nomor 222/2002/Dusun 1 Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang Telp/Hp
081367104122 – KodePos 31352

Nomor : 423.1/ 434 / 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Balasan

Gunung Megang Luar, 23 Januari 2017
Kepada
Yth.Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang
di -
Palembang

Sehubungan dengan adanya Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang yang mengadakan penelitian, maka dengan ini secara Dinas telah kami setuju dan mengizinkan pada :

Nama : DIANA SARI
Nomor Pokok : 22 2012 300

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Desa Gunung Megang Luar terkhusus mengenai tata pelaksanaan keuangan / penatausahaan dibidang keuangan yang dilaksanakan Kantor Pemerintahan Desa Gunung Megang Luar kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, sebagai syarat untuk menyusun skripsi dengan judul :

“ ANALISIS PENGUKURAN KINERJA *VALUE FORMONEY* DALAM MENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PEMERINTAHAN DESA GUNUNG MEGANG LUAR KABUPATEN MUARA ENIM “

Hal ini disampaikan bilamana terdapat kekurangan yang diterima oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang selama di Desa Gunung Megang Luar dimohon kiranya diadakan perbaikan dan penyempurnaan yang lebih baik lagi.

Demikian surat izin ini kami sampaikan untuk maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : DIANA SARI
NIM : 222012300
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (22) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

مارس/٢٠١٦/23
an. Dekan



Wakil Dekan IV



Drs. Anthoni, M.H.I.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Diana Sari
 Place/Date of Birth : Tanjung Emim, August 16th 1994
 Test Times Taken : +2
 Test Date : February. 03rd 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 50
 Structure Grammar : 43
 Reading Comprehension : 34
 OVERALL SCORE : 423

Palembang, February, 06th 2017
 Chairperson of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A.

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 439/TEA FE/LB/UMPII/2017

RECEIVED



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI



LPKKN

No. 030/H-4/LPKKN/UMPP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan
bahwa:

Nama : DIANA SARI

Nomor Pokok Mahasiswa : 222012300

Fakultas : EKONOMI

Tempat Tgl. Lahir : TANJUNG ENIM, 16-08-1994

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal
23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Perambahan

Kecamatan : Banyuasin I

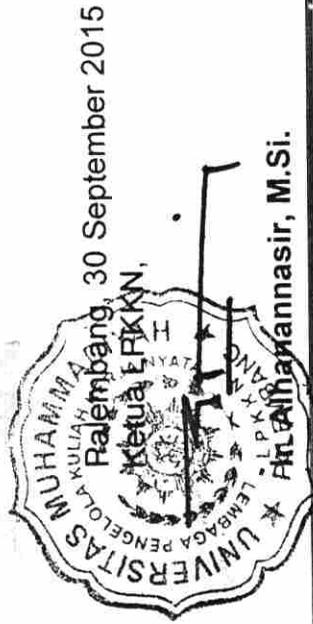
Kota/Kabupaten : Banyuasin

Dinyatakan : Lulus

Mengetahui

Rektor,

DR. H. M. Idris, S.E., M.Si.





FAKULTAS EKONOMI
LABORATORIUM KOMPUTER

SERTIFIKAT

Nomor : 0040 / PAK / LAB.. FE UMP / VIII / 2013

Diberikan Kepada :

Nama : DIANA SARI
 Nim : 222012300
 Tempat Lahir : TANJUNGPINANG
 Tanggal Lahir : 1 AGUSTUS 1994
 Nilai :

89,9	A	SANGAT MEMUASKAN
------	---	------------------



Peserta Pelatihan Komputer Windows, Microsoft Word dan Microsoft Excel yang dilaksanakan dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 (14 Kali: 28 Jam) bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang Desember 2013

Dekan

M. Taufiq Syamsuddin., S.E.,Ak.,MSi

LABORATORIUM KOMPUTER

Nomor : 293/PAK / LAB.. FE UMP/II/ 2016

Diberikan Kepada :

Nama : DIANA SARI

Nim : 222012300

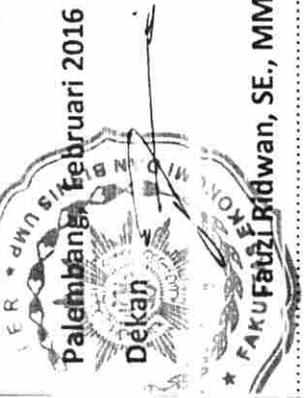
Tempat Lahir : TANJUNG ENIM

Tanggal Lahir : 16 AGUSTUS 1994

Nilai :

80	A	SANGAT MEMUASKAN
----	---	------------------

Peserta Pelatihan Komputer Akuntansi : GENERAL LEDGER EXCEL DAN MYOB FOR ACCOUNTING, yang dilaksanakan dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 (14 Kali: 28 Jam) bertempat di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.



BIODATA PENULIS

1. Data Pribadi:

- a. Nama : Diana Sari
- b. NIM : 22 2012 300
- c. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
- d. Jurusan : Akuntansi
- e. Tempat & Tgl Lahir : Tanjung Enim 16 Agustus 1994
- f. Alamat : Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab.
Muara Enim
- g. No. Hp : 081271719440

2. Data Orang Tua:

- a. Ayah : Dadang Suardi
- b. Ibu : Yuliana
- c. Alamat Orang Tua : Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab.
Muara Enim
- d. Pekerjaan
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Wiraswasta

3. Riwayat Pendidikan:

No	Sekolah	Tahun
1	SD Negeri 2 Cinta Kasih	2000-2006
2	SMP Negeri 6 Tanjung Terang	2006-2009
3	SMA Negeri 1 Gunung Megang	2009-2012
4	Universitas Muhammadiyah Palembang Jurusan Akuntansi S1	2012-2017

Palembang Februari 2017

Penulis

Diana Sari